

PARTISIPASI PURNAWIRAWAN TNI

C

DALAM PARTAI POLITIK

**(Studi Deskriptif Tentang Partisipasi Dan Adaptasi Purnawirawan TNI
Dalam Partai Politik Di Surabaya)**

SRKIPSI

Fis S 14/07

Rac
P



OLEH :

RACHMADIANTI

NIM. 079815753

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**



LEMBAR PERSETUJUAN

PARTISIPASI PURNAWIRAWAN TNI

DALAM PARTAI POLITIK

(Studi Deskriptif Tentang Partisipasi Dan Adaptasi Purnawirawan TNI

Dalam Partai Politik Di Surabaya)

Skripsi ini telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 16 Juni 2006

Dosen Pembimbing



Drs. Sudarso, M.Si

NIP. 132 014 462

LEMBAR PENGESAHAN

PARTISIPASI PURNAWIRAWAN TNI

DALAM PARTAI POLITIK

(Studi Deskriptif Tentang Partisipasi Dan Adaptasi Purnawirawan TNI

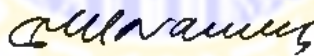
Dalam Partai Politik Di Surabaya)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 10 Juli 2006
Pukul : 10.00 – 11.00 WIB

Tim Penguji


Ketua



Drs. J. Dwi Narwoko, M.A

NIP. 130 355 365

Anggota I



Drs. Benny Sumbodo, M.Si

NIP. 131 287 531

Anggota II



Drs. Sudarso, M.Si

NIP. 132 014 462

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji ditujukan kepada Allah SWT, Tuhan Semesta Alam atas limpahan karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa kekuatan, perlindungan serta kemudahan-Nya, penulis tidak akan mampu melakukan penelitian ini sampai menjadi suatu karya skripsi yang sarat dengan permasalahan dan rintangan di dalamnya.

Skripsi yang berjudul “Partisipasi Purnawirawan TNI Dalam Partai Politik (Studi Deskriptif Tentang Partisipasi dan Adaptasi Purnawirawan TNI dalam Partai Politik di Surabaya) dilatar belakangi oleh

Skripsi ini dapat diselesaikan sudah pasti tidak terlepas dari doa, dukungan dan campur tangan dari banyak pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasihnya yang terdalam, antara lain kepada :

1. Bapak Drs. Sudarso, M.Si., yang telah bersedia menjadi Dosen Pembimbing Skripsi dan telah mendampingi penulis selama tiga semester ini. Terima kasih atas saran, kritik dan motivasinya pada penulis untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. J. Dwi Narwoko, MA., selaku Ketua Program Studi, Dosen Pembimbing Perancangan dan Dosen Penguji Skripsi. Terima kasih atas saran dan masukannya yang sangat berarti selama perancangan, seminar dan Ujian Skripsi.
3. Bapak Drs. I.B. Wirawan, SU., selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan dorongan untuk selalu meningkatkan prestasi akademik.
4. Bapak Drs. Benny Sumbodo, M.Si., sebagai Dosen Penguji Skripsi. Terima kasih atas kritikan dan masukan yang membangun demi perbaikan skripsi.
5. Seluruh Dosen Sosiologi yang telah membagi ilmunya kepada kami selama di bangku perkuliahan sehingga kami mempunyai bekal dalam menghadapi kehidupan sesungguhnya nanti.

6. Terima kasih tak terhingga kepada para informan yang telah bersedia menceritakan kisah hidupnya pada para penulis dan meluangkan waktu selama wawancara berlangsung, berikut pengertian yang begitu besar sehingga dapat membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Papa dan Mama tercinta, terimakasih untuk segalanya...untuk doa, kesabaran, perhatian, dukungan, kepercayaan, pengertian dan kasih sayang yang tidak pernah putus diberikan kepada penulis.
8. Mas Fajar, kakakku tersayang, terimakasih sudah selalu memberi semangat dan sindiran kepada penulis. *Makasih untuk doanya.*
9. Sahabat sejati, sahabat sepanjang masa, Rany Puspita, yang selalu siap membantu dan senantiasa menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. *You've always been there when no one reaches out a hand for me. You always and always have faith in me whenever I feel hopeless. I'm so grateful for this beautiful friendship we have, luv U always...*
10. Wing Prastowo, yang senantiasa memberi dukungan dan perhatian pada penulis.
11. Dinda Bestari, terimakasih atas dukungan dan doanya, juga untuk waktu yang kita bagi dan nikmati bersama. *You're just like a little sister I never have.*
12. Keluarga besar Hardosugondo dan Keluarga besar H. Handoko Soeratmin. Untuk Oma tercinta, terima kasih atas doanya...cepat sembuh ya Oma...; Om Awan, Mama Tin, Egi dan de' Riri terimakasih atas dukungan dan doanya; Om Heru, Ma Susi, Mbak Kara dan de'Furi terima kasih untuk perhatian dan doanya; Om Adi dan Ma Uncu terimakasih untuk dukungan dan doanya. *I love you all and miss you so much..*
13. Om Suparno dan Tante Dwi Ningsih, yang sudah penulis anggap sebagai orang tua sendiri. Terima kasih Om, Tante atas semua kebaikan dan perhatiannya. *Semoga Allah SWT membalas berlipat-lipat budi baik Om dan Tante. Amin.*
14. Keluarga (Alm.) Teguh Prakoesno. Untuk Ibu Arti Rahayu, terima kasih atas dukungan dan doanya; Mbak Rani, teman sekaligus kakak tempat berbagi cerita tentang banyak hal, terima kasih atas perhatian dan doanya; Mbak Nani

(si Nona Amerika), yang pengalaman hidupnya telah menginspirasi penulis dalam banyak hal; Mas Dityo dan Mbak Wiwin, terima kasih atas dukungan dan doanya; Nino dan Reno yang canda tawanya selalu dapat menghibur penulis.

15. Seluruh teman-teman se-angkatan'98, Henry, Ririn, Vita, Nur Anik, Rina, Yen, Diah Kartika, Dea, Uut, Eric (*Makasih ya, udah mau jadi pembahas perancanganku. I really appreciate it...*), khususnya Adi Suprajitno (teman satu pikiran dan teman diskusi yang seru). Terima kasih untuk saat-saat indah yang dijalani bersama penulis selama di bangku kuliah.
16. Setiap pribadi yang tidak disebutkan satu-persatu tetapi ikut ambil bagian dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini. Terima kasih sedalam-dalamnya.

Tiada gading yang tak retak, sama halnya dengan skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa terdapat banyak sekali kekurangan dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini, sehingga penulis sangat membutuhkan saran dan kritik yang membangun agar tercipta suatu karya skripsi yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi para pembacanya untuk dapat melihat fenomena di masyarakat dengan lebih jeli dan peka.

Surabaya, Juni 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	
Lembar Pengesahan	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Daftar tabel	vii
Abstrak	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	
1.4.1. Manfaat Akademis	9
1.4.2. Manfaat Praktis	10
1.5. Kerangka Teori	
1.5.1. Partisipasi Politik	10
1.5.2. Teori Interaksionisme Simbolik	13
1.5.3. Teori Tindakan Sosial	15
1.5.4. Usaha Adaptasi oleh Robert K. Merton	18

1.6. Metodologi Penelitian	
1.6.1. Tipe Penelitian	21
1.6.2. Tema Penelitian	21
1.6.3. Lokasi Penelitian	22
1.6.4. Teknik Pemilihan Informan	23
1.6.5. Teknik Pengumpulan Data	25
1.6.6. Teknik Analisis Data	25
BAB II. GAMBARAN UMUM KAJIAN PENELITIAN	
II.1. Deskripsi Partisipasi dan Partisipasi Politik	27
II.2. Deskripsi Adaptasi	33
II.3. Deskripsi Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI)	35
II.4. Deskripsi Partai Politik	36
II.4.1. Partai Golongan Karya (GOLKAR)	40
II.4.2. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia	43
BAB III. TEMUAN DATA	
III.1. Karakteristik Informan	48
III.2. Latar Belakang Purnawirawan TNI Berpartisipasi Dalam Partai Politik	52
III.3. Adaptasi Purnawirawan TNI Dalam Partai Politik	63

BAB IV. ANALISIS DATA

IV.1. Latar Belakang Partisipasi Purnawirawan TNI Dalam Partai Politik	75
IV.2. Adaptasi Purnawirawan TNI Dalam Partai Politik	84

BAB V. PENUTUP

V.1. Kesimpulan	93
V.2. Rekomendasi	94

DAFTAR PUSTAKA	96
-----------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
III. 1. Karakteristik Informan	51
III. 2. Latar Belakang Purnawirawan TNI berpartisipasi dalam Partai Politik	62
III. 3. Adaptasi Purnawirawan TNI dalam Partai Politik	73

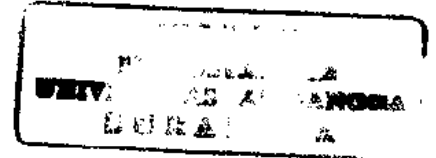


ABSTRAK

Masa reformasi membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial politik, dengan semakin terbuka koridor partisipasi politik rakyat untuk menyalurkan aspirasinya. Masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan budaya dapat berpartisipasi dalam partai politik, diantaranya dari kalangan sipil, akademis maupun militer, meskipun bagi masyarakat dari kalangan militer diperbolehkan bergabung hanya setelah masa dinas berakhir dan menjadi purnawirawan TNI.

Partisipasi dari purnawirawan TNI dalam partai politik menimbulkan ketertarikan tersendiri sehingga dirumuskan suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana latar belakang partisipasi purnawirawan TNI dalam partai politik, mengingat citra buruk yang melekat di masyarakat tentang militer, dan bagaimana purnawirawan TNI tersebut beradaptasi di partai politik yang beranggotakan tidak hanya orang-orang dengan latar belakang yang sama dengan mereka (militer). Teori yang digunakan adalah teori interaksionisme simbolis dari Herbert Blumer, teori tindakan sosial dari Max Weber dan usaha-usaha adaptasi dari Robert K. Merton. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Surabaya, dengan menggunakan metode *purposive* pada teknik pemilihan informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam serta pengumpulan dokumen. Selanjutnya analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, *Pertama*, alasan purnawirawan TNI berpartisipasi dalam partai politik, dibedakan menjadi dua, yaitu karena merasa terpanggil untuk mengabdikan pada suatu partai politik, di mana partai tersebut merupakan binaan dari institusi TNI pada saat purnawirawan masih aktif dan karena ingin memperjuangkan aspirasi sesuai dengan semangat nasionalisme dan idealismenya. Adapun pertimbangan khusus purnawirawan TNI dalam memilih suatu partai politik tempat berpartisipasi adalah karena terdapat kesamaan dalam bidang program kerja dan tujuan antara partai politik itu dengan institusi TNI pada saat masih aktif dan karena tokoh pendiri dari partai tersebut juga mempunyai latar belakang militer. Makna atau arti penting partai politik bagi purnawirawan TNI adalah sebagai penyalur aspirasi politik yang visi dan misinya yang dianggap sama dengan institusi TNI dan sebagai wadah untuk melanjutkan perjuangan TNI setelah pensiun. *Kedua*, purnawirawan TNI dalam berinteraksi di dalam lingkungan partai politik, melakukan usaha-usaha yang dapat digolongkan sebagai suatu komformitas (*comformity*), karena dalam melakukan tindakan untuk mencapai tujuan, disertai upaya-upaya yang sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada, sehingga purnawirawan TNI dapat menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan suatu partai politik.

**BAB I****PENDAHULUAN****I. 1. LATAR BELAKANG MASALAH**

Masyarakat Indonesia beberapa waktu yang lalu telah memberikan suara dalam pemilihan umum, baik untuk memilih anggota legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Pemilihan Umum tahun 2004 yang lalu memang berbeda dengan pemilihan umum-pemilihan umum sebelumnya, bukan saja karena adanya pemilihan presiden secara langsung, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), melainkan juga karena diikuti juga oleh banyak partai, jika dibandingkan dengan Pemilihan Umum sebelum tahun 1999.

Era reformasi telah melahirkan sejumlah perubahan penting. Salah satu perubahan tersebut adalah semakin terbukanya koridor partisipasi rakyat, yang diwujudkan dengan semakin besarnya peluang rakyat untuk mendirikan partai politik. Antusiasme rakyat untuk mendirikan partai politik juga sangat besar terlihat dari jumlah partai politik yang mencapai 24 partai dalam Pemilihan Umum tahun 2004. Salah satu penyebabnya adalah adanya usaha pemerintah pada masa orde baru yang menekan partisipasi politik sebagian golongan atau kelompok masyarakat yang kemudian menimbulkan ketegangan dan perasaan tertekan yang pada akhirnya mendorong pada terjadinya ledakan partisipasi. Adanya amandemen Undang-Undang (UU) khususnya revisi UU Kepartaian telah memberi kesempatan luas bagi warga negara untuk mendirikan partai politik,



meskipun pada akhirnya tidak semua partai politik bisa lolos seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.¹

Di antara ketentuan yang harus dipenuhi sebuah partai politik untuk menjadi peserta pemilu adalah keharusan memiliki pengurus wilayah sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh provinsi dan 2/3 dari seluruh kabupaten/kota. Ini masih ditambah ketentuan harus memiliki 1000 anggota di tiap cabang itu. Ketentuan tersebut memang cukup berat, tidak mengherankan, jika dalam Pemilu 2004, jumlah partai peserta pemilu semakin sedikit. Dari 48 partai politik dalam Pemilu 1999, hanya 24 partai yang berpartisipasi dalam Pemilu 2004.²

Seperti telah diketahui bahwa selama Orde Baru, peran dan fungsi partai politik di tengah-tengah masyarakat belumlah optimal, kedudukan partai politik yang pada prinsipnya sebagai sarana sosialisasi politik masyarakat, ternyata berubah fungsi menjadi alat sosialisasi kepentingan pihak penguasa. Akibatnya, hubungan antara partai politik dengan masyarakat cukup rentan dan bahkan tidak terjembatani. Kondisi partai cenderung apatis terhadap persoalan rakyat dan kurang aspiratif. Akibatnya, fungsi dan peran utama sebuah partai politik menjadi tidak optimal karena dibelenggu oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang telah dikooptasi oleh penguasa.³ Selain itu juga dilakukan rekayasa politik untuk melanggengkan kedudukan dan kekuasaan. Rekayasa politik dilakukan dengan sistematis, misalnya pada tahun 1971 partai politik peserta Pemilu disederhanakan menjadi 9 partai politik dan Golongan Karya. Kemudian atas perintah Soeharto, Presiden saat itu, dasarankan kepada organisasi partai politik

¹ Faisal Baasir, "*Indonesia Pasca Krisis*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.13

² Ibid., hal 13-14

³ Ibid., hal 14



yang ada untuk mengadakan pengelompokan. Selanjutnya pada Pemilu tahun 1977 hanya diikuti oleh 3 partai politik saja, yaitu Golkar, PPP dan PDI.⁴

Pada masa pemerintahan Orde Baru, kepemimpinan berada di tangan Soeharto, salah satu cirinya adalah pelaksanaan pembangunan yang menekankan situasi politik dan stabilitas politik yang aman. Untuk mewujudkan hal tersebut, dimunculkanlah posisi untuk ABRI dalam tampuk kepemimpinan pemerintahan. Dapat dikatakan bahwa sumber kekuatan Orde Baru berasal dari ABRI. Sejak awal Orde Baru, ide pemilihan umum mendapat dukungan dari berbagai pihak. Beberapa kelompok mahasiswa dan kekuatan-kekuatan lain baik sipil maupun militer ingin memanfaatkan pemilu sebagai alat untuk mulai menyusun kembali sistem kepartaian secara menyeluruh. Tetapi bagi Soeharto dan kroni-kroninya, pemilihan umum adalah untuk menyelamatkan kendali kekuasaan parlemen, MPR dan lembaga-lembaga legislatif daerah yang tidak dapat ditentang. Untuk tujuan itulah lalu diciptakan sebuah organisasi baru, yaitu Golongan Karya.⁵ Meskipun pemilihan umum itu dilaksanakan dengan jujur, taktik kampanye Golkar diwarnai dengan paksaan. Kebanyakan pegawai negeri dan pamong desa dilarang berkampanye untuk partai pilihan merka sendiri dan diharuskan bergabung dan bekerja untuk Golkar. Kegiatan semacam ini tentu saja diawasi dan dilaksanakan oleh bantuan militer. Sebagai contoh paksaan dalam rangka mensukseskan Golkar untuk memenangkan Pemilu 1971 adalah dengan menyampaikan target atau sasaran kegiatan Golkar yang mungkin suaranya dapat diraih adalah dengan mengharuskan kelompok-kelompok tertentu untuk menjadi anggota atau

⁴ Ibid., hal 23

⁵ William R.Liddle, "*Partisipasi dan Partai Politik Pada Awal Orde Baru*", PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1992, hal.195.



memberikan suaranya untuk memilih Golkar dalam Pemilu 1971. Kelompok-kelompok tersebut meliputi:

1. Keluarga anggota ABRI.
2. Pegawai sipil hankam beserta keluarganya.
3. Para pegawai negeri yang tidak diijinkan mengikuti partai politik.
4. Para pegawai negeri lainnya yang setia pada pemerintah, beserta keluarganya.
5. Para personil Hansip, Veteran, anggota organisasi Pramuka dan anggota PEBABRI (Persatuan Pensiunan ABRI).
6. Penduduk yang tinggal di pedesaan.
7. Para petani, buruh, cendekiawan, pemuda, pelajar, mahasiswa yang tidak berafiliasi dengan partai politik
8. Wanita, seniman, olahragawan, dan sebagainya.⁶

Hasilnya, Pemilu tahun 1971, dengan kekuatan Orde Baru yang didukung sepenuhnya oleh militer dan diperankan oleh Golkar, ternyata berhasil memenangkan Pemilu.⁷ Dari kenyataan di atas, terlihat jelas adanya hubungan yang kuat antara militer (ABRI) dengan pemerintah. Selama Soeharto berkuasa, ABRI selalu dikemukakan sebagai pendukung dan menjadi kekuatan politik untuk melanggengkan rezim.

Berbicara tentang keikutsertaan ABRI dalam dunia politik, tidak terlepas dari pembicaraan tentang Dwi Fungsinya. Perjalanan ABRI berlangsung bersama dengan sistem kekuasaan Soeharto. Ketika rezim ini jatuh pada masa reformasi,

⁶ Suwardi, *"Golongan Karya Salah Satu Kekuatan Politik Indonesia"*, Skripsi, FISIP Universitas Airlangga, Surabaya, 1987: 67

⁷ Sali Susiana, *"Pemilu 2004 Analisis Politik, Hukum dan Ekonomi"*, P31 Setjen DPR RI, Jakarta, 2003, hal.36



maka posisi militer pun digugat. Dwi fungsi ABRI diteriakkan sebagai “barang haram” dan harus dihapuskan. Reaksi ini mendapat respon dari lingkungan ABRI sendiri. *Pertama*, istilah ABRI tidak lagi digunakan dan sepenuhnya hanya digunakan istilah TNI. *Kedua*, POLRI dipisahkan dari TNI dan POLRI berada langsung dibawah Presiden. *Ketiga*, TNI aktif yang memegang jabatan struktural non-TNI di departemen pemerintahan tidak diperbolehkan untuk tetap menggunakan atribut-atribut TNI. Artinya, jika tetap pada jabatan non-TNI, maka harus pensiun atau non aktif dari kedinasannya.⁸ Hal ini sesuai dengan pasal 39 UU No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyebutkan bahwa prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.⁹

Pilihannya sekarang adalah tetap di TNI atau pensiun dini sebelum menjadi calon untuk jabatan apapun di luar TNI. Jika sudah terlanjur mengajukan pensiun atau pengunduran diri tetapi gagal dalam mendapatkan jabatan, itu resiko yang harus dipikul sendiri, sebab tidak dapat kembali lagi masuk menjadi anggota TNI.¹⁰

Dalam kenyataannya, dengan aturan tersebut yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan politik, memang mematuhi aturan yang ada. Dalam pengertian, menunggu sampai pada masa pensiun tiba lalu berpartisipasi dengan bergabung dalam keanggotaan partai politik. Bagi yang telah pensiun dan tergabung dalam

⁸ Salim Said, *“Wawancara Tentang Tentara dan Politik”*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, Catatan Pengantar oleh Dr.Anhar Gonggong, hal.xiii.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No.34 tahun 2004, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004, hal.33.

¹⁰ Salim Said, *op.cit*, Pustaka Sinar Harapan, hal.74.



Persatuan Pensiunan ABRI (PEPABRI) juga menyambut baik kesempatan ini, karena pada masa Orde Baru mereka diharuskan masuk ke Golkar. Resikonya, jika keluar, akan melawan Soeharto, Presiden saat itu, dan rejekinya akan habis. Sekarang setelah Soeharto lengser, mencari partai politik mana yang sesuai dan lebih aspiratif bagi mereka.¹¹ Ini terlihat dari banyaknya anggota TNI yang sudah menjadi purnawirawan, berpartisipasi dalam partai-partai politik peserta Pemilu tahun 2004. Beberapa nama purnawirawan TNI dari masing-masing kesatuan (TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU) ikut mendirikan partai dan/atau dapat ditemukan di kepengurusan partai seperti Jendral (Purn) Edi Sudrajat yang kalah bersaing kemudian mendirikan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia. Kader-kader Golkar lainnya seperti Jendral (Purn) R.Hartono dan Ary Marjono (mantan sekjen Golkar), dengan dukungan Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut) mendirikan Partai Karya Peduli Bangsa yang disingkat PKPB.¹² Hal ini memang tidak bertentangan dengan UU No. 31 tahun 2002 tentang partai politik pasal 10 :

- Ayat 1 : Warga negara Indonesia dapat menjadi anggota partai politik apabila telah berumur 17 tahun atau sudah (pernah) kawin.
- Ayat 2 : Keanggotaan partai politik bersifat sukarela, terbuka dan tidak diskriminatif bagi setiap warga negara Indonesia yang menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang bersangkutan.¹³ Dan ini diperkuat oleh pernyataan Panglima TNI Jendral Endriartono Sutarto yang menyatakan bahwa adanya purnawirawan TNI yang terjun ke dunia politik

¹¹ Indria Samego, *"TNI di Era Perubahan"*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2001, hal.25.

¹² www.mail-archieve.com

¹³ Undang-Undang Politik 2003, Fokusmedia, Bandung, 2003, hal.8.



adalah hak mereka dan tidak ada hubungannya dengan TNI. (*Kompas*, Jumat 23 Januari 2004).

Para purnawirawan TNI yang bergabung ke dalam suatu partai politik adalah orang-orang yang selama ini kehilangan kebebasannya karena dulu Persatuan Pensiunan ABRI (PEPABRI) pada masa Orde Baru, hanya diperbolehkan masuk ke Golkar. Resiko jika keluar, maka akan melawan Soeharto, Presiden saat itu, dan rejekinya akan habis. Sekarang, setelah Soeharto lengser, maka mereka mencari partai politik mana yang lebih aspiratif.¹⁴

Tetapi meski telah berstatus purnawirawan TNI, tetap saja mempunyai latar belakang militer, yang notabene disangsikan oleh masyarakat. Dalam pengertian, masyarakat skeptis terhadap wakil rakyat dengan latar belakang militer karena reputasi yang masih melekat dari masa Orde Baru dan tidak yakin bahwa tidak akan mengecewakan masyarakat seperti pada masa pemerintahan Orde Baru. Bagi masyarakat tetap saja Orde Baru itu adalah ABRI dan ABRI adalah TNI. Ketika TNI menjadi sasaran itulah, maka TNI identik masih merupakan bencana dan penderitaan yang ditimpakan Orde Baru pada rakyat. Hal itu bersumber pada adanya peran politik tentara.¹⁵

Selain itu, secara politik, TNI masih menjadi sebuah konsep generik bagi keluarga besar TNI yang diwadahi ke dalam Persatuan Pensiunan ABRI (PEPABRI). Dalam banyak kesempatan, terbukti bahwa hubungan antara perwira yang masih aktif dan para senior yang sudah pensiun terjalin sangat erat. Bukan hanya pada sosialitasnya saja yang terasa, tapi juga dalam politiknya. Alasan lain

¹⁴ Indria Samego, "TNI di Era Perubahan". Penerbit Erlangga, Jakarta, 2000, hal.25.

¹⁵ Salim Said, op.cit.,Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hal.60.



adalah karena proses suksesi yang terjadi di Indonesia hampir selalu diwarnai oleh kondisi yang kacau. Tidak adanya preseden bahwa peralihan kekuasaan di negara ini yang berlangsung damai dan bertahap. Seolah-olah sejarah mengajarkan kepada kita bahwa kekuasaan itu untuk direbut bukan untuk diserahkan. Karena diperoleh dengan cara yang tidak damai itulah, maka kekerasan menjadi elemen utamanya. Di sini, TNI merupakan suatu organisasi yang memiliki monopoli kekerasan maka sulit baginya untuk netral dalam proses suksesi tersebut.¹⁶

Bagi para purnawirawan yang berpartisipasi politik dengan bergabung dalam partai politik, pasti diperlukan mental yang kuat untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Hal ini wajar, mengingat meskipun telah pensiun dari tugasnya sebagai anggota TNI dan kembali ke masyarakat, tetap saja masih membawa karakteristik yang khas dari lingkungan sebelumnya, di mana hanya berinteraksi dengan orang-orang dengan latar belakang yang sama yaitu militer. Di lingkungan yang baru, dalam hal ini adalah organisasi politik, harus dapat berinteraksi dengan individu-individu dengan berbagai latar belakang, baik itu dari sesama kalangan militer maupun sipil agar ia dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya dengan berpartisipasi dalam partai politik.

¹⁶ Indria Samego, *op.cit.*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2000, hal.89.



I. 2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka dapat dirumuskan yaitu :

1. Bagaimana latar belakang purnawirawan TNI dalam berpartisipasi di lingkungan partai politik ?
2. Bagaimana purnawirawan TNI beradaptasi dalam partai politik ?

I. 3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan mengenai latar belakang purnawirawan TNI yang berpartisipasi dalam partai politik di Surabaya. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat dan mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana purnawirawan TNI beradaptasi di lingkungan partai politik.

I. 4. MANFAAT PENELITIAN

I. 4. 1. Manfaat Akademis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan dan menerapkan teori-teori sosiologi yang telah diterima di bangku kuliah dan untuk lebih memahami fenomena partisipasi purnawirawan TNI dalam partai politik. Penelitian ini juga diharapkan akan mampu memberikan informasi serta kajian-kajian tentang partisipasi dan adaptasi purnawirawan TNI ini sebagai salah satu kajian dalam Sosiologi Politik.



I. 4. 2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh gambaran empirik-kualitatif tentang partisipasi purnawirawan TNI. Dan dalam penelitian ini juga diharapkan akan memperoleh gambaran bagaimana purnawirawan TNI tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungan baru (partai politik) yang berbeda dengan lingkungan sebelum menjadi purnawirawan serta untuk menambah sumber informasi dalam ilmu pengetahuan yang mungkin akan bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

I. 5. KERANGKA TEORI

1. 5. 1. Partisipasi Politik

Fenomena mengenai purnawirawan TNI yang berpartisipasi dalam partai politik disebutkan sebagai wujud partisipasi politik dalam bentuk kegiatan organisasi. Usaha pemerintah pada masa orde baru yang menekan partisipasi politik mereka dengan menghilangkan kebebasan memilih partai politik sesuai aspirasi dan mengharuskan para purnawirawan TNI yang tergabung dalam Persatuan Pensiunan ABRI (PEPABRI) untuk memilih Golkar, menyebabkan ketegangan dan perasaan tertekan yang pada akhirnya menimbulkan ledakan partisipasi di masa reformasi.

Partisipasi politik adalah seseorang atau kelompok yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberi suara dalam pemilihan umum,



menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik atau kelompok kepentingan, mengadakan kepentingan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Partisipasi politik memiliki beberapa pola orientasi yang berhubungan dengan proses politik. Ada partisipasi politik yang berorientasi pada *output* dan berorientasi pada *input*. Partisipasi politik yang berorientasi pada input adalah aktivitas individu yang berkenaan dengan masukan-masukan dalam proses pembuatan keputusan. Dapat diwujudkan dalam bentuk memberi tuntutan, dukungan atau ulasan analisis terhadap bagaimana baiknya suatu rancangan keputusan yang akan mengikat setiap kelompok dalam sistem politik. Bagi yang sangat aktif, banyak memiliki informasi dan memiliki tingkat kedekatan dengan elit. Partisipasi yang berorientasi output adalah aktivitas individu atau kelompok yang melakukan tindakan politik yang berhubungan dengan kebijakan politik, berwujud dalam tindakan yang berusaha menjalankan kebijakan dan melestarikannya.

Sementara itu **Frank Lindenefeld** menemukan bahwa faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. **Milbrath** kemudian menyebutkan empat faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. *Pertama*, karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi misalnya oleh sering mengikuti diskusi-diskusi politik politik melalui media massa atau melalui diskusi informal. *Kedua*, karena faktor karakteristik pribadi seseorang. Orang-orang yang berwatak sosial,



yang punya kepedulian besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi dan lain-lainnya, biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik. *Ketiga*, faktor karakter sosial seseorang. Karakter sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang. Bagaimanapun lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan dan lain-lainnya tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Dan untuk itulah mereka mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. *Keempat*, faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik.¹⁷ Dalam lingkungan politik yang demokratis, orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktifitas-aktifitas politik ketimbang dalam lingkungan politik yang totaliter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktifitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.

Di samping faktor-faktor tersebut, dapat disebutkan pula faktor-faktor lain seperti syarat legal bagi suatu sistem pemilihan, sifat dari sistem partai dan ciri kepemimpinan yang dikembangkan oleh suatu partai politik. Faktor-faktor ini juga mempengaruhi berpartisipasi orang dalam kehidupan politik. Syarat legal yang bermacam-macam akan membuat orang enggan untuk berpartisipasi dalam suatu aktifitas politik. Di dalam masyarakat yang menerapkan sistem pembagian kelas yang cenderung kaku akan timbul partai-partai yang berdasarkan kelas. Lalu

¹⁷ Rafael Raga Maran, "*Pengantar Sosiologi Politik*", Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal 156-157.



ciri kepemimpinan yang demokratis dan manusiawi, lebih didukung oleh berbagai kalangan, ketimbang ciri kepemimpinan yang otoriter.

1. 5. 2. Teori Interaksionisme Simbolis

Teori interaksionisme simbolis dapat digunakan untuk membahas tindakan purnawirawan TNI dalam memberi makna suatu partai politik yang mendorong dirinya untuk berpartisipasi di dalam partai tersebut. Perspektif interaksionisme simbolis menyetengahkan makna-makna subyektif ke dalam analisis sosiologis, yaitu analisis aspek-aspek perilaku manusia yang subyektif dan interpretatif. Pandangan interaksionisme simbolis memandang manusia bukan sebagai produk yang ditentukan oleh struktur atau situasi obyektif, tapi paling tidak sebagian merupakan aktor-aktor bebas. Pendekatan ini juga menekankan perlunya sosiologi memperhatikan definisi atau subyektif yang dilakukan oleh aktor terhadap stimulus obyektif, bukannya melihat aksi sebagai tanggapan langsung dari stimulus sosial.¹⁸

Menurut **George H. Mead**, realita sosial dipandang sebagai suatu proses. Manusia maupun aturan sosial berada dalam proses yang akan jadi, bukan sebagai fakta yang sudah lengkap. Penjelasan Mead adalah bahwa diri atau *self* menjalani internalisasi atau interpretasi subyektif atas realita struktur yang lebih luas. Diri atau *self* benar-benar merupakan internalisasi seseorang atas kebiasaan-kebiasaan sosial komunitas yang lebih luas. Diri berkembang saat seseorang belajar mengambil peran orang lain. Dalam berpartisipasi pada kegiatan politik misalnya

¹⁸ Margaret M. Poloma, "*Sosiologi Kontemporer*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal.256.



pemilihan umum, seorang purnawirawan yang tidak tergabung dalam dalam partai politik hanya menyadari perilaku diri-nya saja, tidak harus menyadari bagian yang dimainkan oleh orang lain. Tetapi akan berbeda bila bergabung dalam suatu partai politik, harus mempertimbangkan peranan orang lain yang ada dalam lingkungan partai tersebut di mana tidak hanya terdiri dari individu-individu dengan latar belakang militer saja tapi lebih beragam dan lebih luas lingkupnya. Seseorang purnawirawan TNI memainkan peran yang sesuai dengan peranan anggota lain dalam partai politik berdasarkan perilaku aktual dan tugas masing-masing seperti yang diharapkan oleh anggota lain. Penyesuaian yang demikian akan membuat diri-nya hadir dalam perspektif anggota lain yang terlibat dalam partai politik.

Interaksionisme simbolis dilakukan dengan menggunakan bahasa sebagai simbol yang terpenting dan melalui isyarat. Simbol bukan merupakan fakta yang sudah jadi, simbol berada dalam proses yang kontinu. Proses penyampaian makna inilah yang menjadi *subject matter* dalam interaksi simbolis. Bagi **Mead**, subject matter sosiologi adalah interaksi para aktor yang terorganisir dan terpola di dalam berbagai situasi sosial.¹⁹

Menurut **Herbert Blumer** (1969:2), interaksi simbolis bertumpu pada tiga premis. Pertama, manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. Kedua, makna tersebut berasal dari interaksi seseorang dengan orang lain. Ketiga, makna-makna tersebut disempurnakan saat interaksi sosial berlangsung. Selanjutnya, **Blumer** menyatakan, bagi seseorang, makna dari sesuatu berasal dari cara-cara orang lain

¹⁹ Ibid., hal. 258.



bertindak terhadapnya dalam kaitannya dengan sesuatu itu. Tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu akan melahirkan batasan sesuatu bagi orang lain (1969:4-5). Aktor memilih, memeriksa, berpikir, mengelompokkan dan mentransformir makna dalam hubungannya dengan situasi dimana ia ditempatkan dan arah tindakannya (1969:5). Interaksi seharusnya dianggap sebagai suatu proses pembentukan di mana makna yang dipakai dan disempurnakan sebagai instrumen bagi pengarah dan pembentukan tindakan.²⁰

I. 5. 3. Teori Tindakan Sosial

Teori tindakan sosial **Max Weber** dapat digunakan untuk mengkaji masalah-masalah yang berhubungan dengan motivasi dan arti subyektif individu. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk menganalisis hubungan penting antara pola-pola motivasi subyektif dan pola-pola institusional yang besar dalam masyarakat. Kenyataan sosial secara mendasar terdiri dari individu-individu dan tindakan-tindakan sosial yang berarti.

Aspek pemikiran Weber yang paling terkenal adalah penekanannya pada pemahaman subyektif (*verstehen*) sebagai metode untuk mendapatkan pemahaman yang valid mengenai arti-arti subyektif tindakan sosial. Baginya, konsep rasionalitas merupakan kunci bagi suatu analisa obyektif mengenai arti subyektif dan juga merupakan dasar perbandingan obyektif mengenai jenis-jenis tindakan sosial yang berbeda.

²⁰ Ibid., hal. 259-260.



Rasionalitas dan peraturan yang biasa mengenai logika merupakan suatu kerangka acuan bersama secara luas di mana aspek subyektif perilaku dapat dinilai secara obyektif. Tidak semua perilaku dapat dimengerti sebagai suatu manifestasi rasionalitas, tetapi orang dapat mengerti (*verstehen*) perilaku seperti itu kalau orang tahu emosi yang mendasar yang sedang diungkapkannya. Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan Weber dalam pengelompokkannya tentang tipe-tipe tindakan sosial. Perbedaan pokok yang diberikan adalah antara tindakan rasional dan non rasional. Pada intinya, tindakan rasional berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan.

Di dalam dua kategori utama mengenai tindakan rasional dan non rasional terdapat dua bagian yang berbeda satu sama lain. Termasuk dalam kategori tindakan rasional, mencakup Rasionalitas Instrumental dan Rasionalitas yang Berorientasi Nilai. Termasuk dalam tindakan non rasional, mencakup tindakan tradisional dan tindakan afektif.

1. Rasionalitas Instrumental (*Zweckrationalitat*)

Tingkat rasionalitas yang paling tinggi ini meliputi pertimbangan dan pilihan yang sadar, yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Individu dilihat sebagai memiliki macam-macam tujuan yang mungkin diinginkannya, dan atas dasar suatu kriterium menentukan satu pilihan di antara tujuan-tujuan yang saling bersaing ini. Individu itu lalu menilai alat yang mungkin dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan yang dipilih tadi. Hal ini mencakup pengumpulan informasi,



mencatat kemungkinan-kemungkinan serta hambatan-hambatan yang terdapat dalam lingkungan, dan mencoba untuk meramalkan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin dari beberapa alternatif tindakan itu. Akhirnya suatu pilihan dibuat atas alat yang dipergunakannya, yang kiranya mencerminkan pertimbangan individu atas efisiensi dan efektivitasnya. Sesudah tindakan itu dilaksanakan, orang itu dapat menentukan secara obyektif sesuatu yang berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai.

2. Rasionalitas yang Berorientasi Nilai (*Wertrationalitat*)

Sifat rasionalitas yang berorientasi nilai yang penting ini adalah bahwa alat-alat hanya merupakan obyek pertimbangan dan perhitungan yang sadar ; tujuan-tujuannya sudah ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut atau merupakan nilai akhir baginya. Nilai-nilai akhir bersifat non rasional dalam hal ini di mana seseorang tidak dapat memperhitungkannya secara obyektif mengenai tujuan-tujuan mana yang harus dipilih. Lebih lagi, komitmen terhadap nilai-nilai ini adalah sedemikian sehingga pertimbangan-pertimbangan rasional mengenai kegunaan (*utility*), efisiensi dan lain sebagainya tidak relevan. Juga orang tidak memperhitungkannya (kalau nilai-nilai benar-benar bersifat absolut) dibandingkan dengan nilai-nilai alternatif. Individu mempertimbangkan alat untuk mencapai nilai-nilai seperti itu, tetapi nilai-nilai itu sendiri sudah ada.

3. Tindakan Tradisional

Tindakan tradisional merupakan tipe tindakan sosial yang bersifat non rasional. Kalau seorang individu memperlihatkan perilaku karena kebiasaan,



tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan, perilaku seperti itu digolongkan sebagai tindakan tradisional. Individu itu akan membenarkan atau menjelaskan tindakan itu, kalau diminta, dengan hanya mengatakan bahwa dia selalu bertindak dengan cara atau perilaku seperti itu merupakan kebiasaan baginya. Apabila kelompok-kelompok atau seluruh masyarakat didominasi oleh orientasi ini, maka kebiasaan dan institusi mereka diabsahkan atau didukung oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah lama mapan sebagai kerangka acuannya, yang diterima begitu saja tanpa persoalan.

4. Tindakan Afektif

Tipe tindakan ini ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Tindakan itu benar-benar tidak rasional karena kurangnya pertimbangan logis, ideologis, atau kriteria rasionalitas lainnya.²¹

I. 5. 4. Usaha Adaptasi oleh Robert K. Merton

Pada dasarnya **Robert K. Merton** mengembangkan teori yang berhubungan dengan penyimpangan (deviasi) dari sudut struktur sosial dan budaya. Menurutny, di antara segenap unsur sosial budaya, yaitu terdapat dua unsur terpenting, yaitu, kerangka aspirasi dan unsur yang mengatur segala kegiatan untuk mencapai aspirasi tersebut. Dengan kata lain, terdapat nilai-nilai sosial budaya yang merupakan rangkaian konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup di dalam alam pikiran bagian terbesar individu yang ada pada suatu kelompok

²¹ Paul Doyle Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid 1*, PT Gramedia, Jakarta, 1986, hal. 216, 219 – 221.



tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Juga terdapat kaidah yang mengatur kegiatan-kegiatan manusia untuk mencapai tujuannya. Nilai-nilai tadi menjadi pedoman dan pendorong perilaku individu dalam hidupnya. Apabila terjadi ketidak serasian antara aspirasi dengan saluran-saluran untuk mencapai tujuan tersebut, maka terjadilah perilaku yang menyimpang.²²

Selubungan dengan itu, **Merton** menyusun suatu skema yang menggambarkan usaha-usaha individu untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang ada dalam suatu kelompok masyarakat untuk mencapai tujuannya.

Cara adaptasi	Tujuan	Aturan yang melembaga
1. Conformity	+	+
2. Innovation	+	-
3. Ritualism	-	+
4. Retreatism	-	-
5. Rebellion	±	±

Keterangan :

Conformity (konformitas) adalah cara adaptasi di mana individu menerima atau mendapatkan tujuan (+) dengan cara menerima atau tunduk terhadap aturan yang sudah melembaga. *Innovation* (inovasi) adalah cara adaptasi di mana individu mendapatkan tujuannya (+) tetapi menolak atau dengan cara-cara di luar aturan yang sudah melembaga (-). *Ritualism* (ritualisme) adalah cara adaptasi di mana individu sebenarnya sudah tidak mengindahkan sebagian besar tujuannya (-), tapi

²² Soerjono Soekanto, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal.238-239)



masih tetap mempertahankan aturan yang telah melembaga. *Retreatism* (pengunduran diri) adalah cara adaptasi di mana individu meninggalkan tujuan yang ingin dicapainya (-) dan tidak menerima aturan yang melembaga (-). *Rebellion* (pemberontakan) adalah cara adaptasi individu dengan cara menarik diri dari tujuan dan cara konvensionalnya (\pm) yang disertai dengan usaha-usaha untuk melembagakan tujuan dan mengganti aturan yang sudah melembaga dengan aturan yang baru (\pm).²³

Perubahan dan ketidakpastian peran yang ditetapkan masyarakat di masa depan menyebabkan keluwesan dan penyesuaian merupakan prasyarat yang perlu untuk bertahan dalam hidup. Misalnya, di kalangan militer, para prajurit dilatih sejak menjalani pendidikan di akademi militer untuk bersikap penuh disiplin, patuh dan taat pada pimpinan, serta menempatkan diri sesuai dengan pangkat dan jabatannya, kemudian ketika terjadi peralihan status dari seorang prajurit TNI menjadi seorang sipil dalam suatu organisasi yaitu partai politik, diharapkan mampu menjadi lebih luwes, demokratis dan tidak terlalu ketat berdisiplin dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang baru. Dengan kata lain, harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru tersebut. Untuk itu, dengan menggunakan cara-cara penyesuaian diri atau adaptasi sebagaimana yang disebutkan oleh **Merton**, diharapkan mampu menjelaskan bagaimana purnawirawan TNI beradaptasi dalam partai politik.

²³ Paul B. Horton & Chester L. Hunt, "*Sosiologi jilid 1*", Edisi keenam, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1993, hal.133.



I. 6. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Berikut ini akan diuraikan secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang meliputi :

I. 6. 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yang sifatnya deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan tentang fenomena yang melatar belakangi seorang purnawirawan TNI berpartisipasi di dalam lingkungan partai politik.

Dalam penelitian ini nantinya, data akan diperoleh dari data primer dan sekunder yang kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Hal ini untuk dapat mempertajam bacaan data-data di lapangan sehingga penelitian ini memungkinkan untuk memperoleh data yang mendalam.

I. 6. 2. Tema Penelitian

Untuk lebih mempertajam ruang lingkup, kiranya berupaya menjabarkan beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini, yakni :

- **Partisipasi** adalah turut berperan serta dengan mengambil bagian dalam suatu kegiatan.
- **Partisipasi Politik** adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam kehidupan politik, yaitu dengan mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan yang mencakup kegiatan seperti memberi suara



dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik atau kelompok kepentingan.²⁴

- **Latar Belakang Partisipasi Politik** adalah alasan-alasan yang dapat mempengaruhi informan untuk berpartisipasi dalam partai politik.
- **Purnawirawan TNI** adalah anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah selesai melaksanakan kedinasan militer dan kembali ke masyarakat.
- **Partai Politik** adalah organisasi yang mempunyai kegiatan yang berkesinambungan, terbuka dan permanen tidak hanya di tingkat pusat, tapi juga di tingkat lokal dan ikut serta dalam pemilihan umum.
- **Adaptasi** adalah pola-pola yang dibentuk oleh berbagai penyesuaian yang direncanakan oleh manusia untuk mendapatkan sumber daya untuk memecahkan masalahnya.
- **Proses Adaptasi** adalah serentetan kegiatan yang sambung menyambung dan berakhir pada suatu ujung yang merupakan hasil dari kegiatan tersebut.

1. 6. 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di kotamadya Surabaya, Jawa Timur. Yang menjadi obyek penelitian di sini adalah purnawirawan TNI yang berpartisipasi dalam partai politik, maka penelitian ini akan mengambil informan yang ada di kantor-kantor Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II (DPD Tk.II) Partai Golkar dan Dewan Pimpinan Kota (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia. Adapun alasan penentuan lokasi penelitian ini adalah

²⁴ Ramlan Surbakti, "*Memahami Ilmu Politik*", PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 118.



berdasarkan pertimbangan untuk memudahkan dalam melakukan pengumpulan data yang akan diteliti, yaitu orang-orang yang merupakan purnawirawan TNI. Selain itu, karena kantor DPD Tk.II dan DPK partai politik merupakan tempat bagi perwakilan partai politik di tingkat kotamadya.

1. 6. 4. Teknik Pemilihan Informan

Dalam penelitian ini seseorang yang dijadikan informan adalah para purnawirawan TNI yang berpartisipasi dalam partai politik, khususnya yang ada dalam kepengurusan partai. Dalam pemilihan informan ini mempertimbangkan, *Pertama*, informan yang mengerti dan memahami permasalahan yang dilakukan, yakni ingin mengetahui latar belakang partisipasi purnawirawan TNI dalam partai politik. *Kedua*, informan yang telah berpartisipasi dalam partai politik selama minimal 1 tahun terakhir sejak memutuskan untuk berpartisipasi dalam partai politik, sehingga diharapkan dapat menjelaskan bagaimana proses adaptasi dalam lingkungan baru.

Berkaitan dengan proses pemilihan informan, pada awalnya memang datang sendiri ke kantor Dewan Perwakilan Cabang (DPC) atau sebutan lain yang setara tingkatannya di beberapa partai politik, kemudian dibantu oleh sekretaris dewan pengurus cabang untuk memberi informasi, adakah purnawirawan TNI dalam partai mereka. Bila ada, meminta informasi tentang nama dan dari kesatuan TNI mana purnawirawan TNI tersebut dan menduduki posisi apa dalam partai politik. Hal ini jelas sangat membantu dalam memperoleh data sementara. Key



informannya adalah sekretaris DPD Tk.II dan pengurus yang membidangi kaderisasi dan verifikasi dalam partai politik.

Pemilihan informan dilakukan dengan metode *Purposive*, yaitu teknik pemilihan informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan sifat-sifat yang dapat diketahui sebelumnya. Dalam konteks ini adalah informan yang secara aktif terlibat langsung dalam kegiatan partai politik, diharapkan dapat menjelaskan permasalahan yang ingin diteliti. Penelitian ini adalah kualitatif, maka yang akan menjadi fokus penelitiannya adalah kedalaman informasi. Penelitian ini berusaha memahami sudut pandang dan konteks subyek penelitian secara mendalam.

Banyaknya jumlah informan sebagai obyek penelitian bukanlah menjadi ukuran dari ketentuan yang ada tetapi lebih pada pertimbangan sejauh mana data yang dikumpulkan itu dirasa cukup dengan variasi yang beragam dan pengumpulan data dapat dihentikan bila data-datanya telah cukup menggambarkan gejala yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian tentang partisipasi purnawirawan TNI dalam partai politik ini telah didapatkan informan sebanyak 3 informan dan para informan ini mempunyai latar belakang yang berbeda sehingga hasilnya diharapkan benar-benar dapat menggambarkan fenomena yang diteliti dan menjawab permasalahan.

Ke-3 informan didapatkan melalui beberapa perantara, yang memiliki informasi mengenai ada tidaknya purnawirawan TNI yang berpartisipasi dalam partai politik. Perantara tersebut juga merupakan salah satu pengurus dalam partai politik.



I. 6. 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan berupa :

Data Primer:

- Wawancara mendalam (*indepth interview*), di mana dilakukan wawancara dengan menggunakan petunjuk umum wawancara. Pewawancara akan menggunakan kerangka dan garis besar dari pokok-pokok yang akan ditanyakan dalam proses wawancara. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan akan disesuaikan dengan keadaan informan dalam konteks wawancara yang sebenarnya.

Data Sekunder :

- Data sekunder merupakan sumber data kedua setelah data primer yang berfungsi membantu memberi keterangan atau sebagai data pelengkap. Data-data sekunder ini diperoleh dari buku, media massa dan laporan penelitian. Data sekunder bertujuan untuk mengetahui adanya partisipasi purnawirawan dalam partai politik, serta data-data mengenai purnawirawan TNI.

I. 6. 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Penemuan teori baru atau verifikasi teori akan tampak sewaktu analisis data ini dilakukan.²⁵ Data-data sekunder dan primer yang diperoleh di lapangan akan dikelompokkan dan diatur sedemikian rupa agar nantinya dapat mempermudah peneliti mengolah data-data tersebut. Data-data yang telah

²⁵ Dr. Lexy J. Moleong, M.A, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", cetakan ke-17, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1989, hal.103-104.



dikelompokkan dan diatur tersebut nantinya akan dianalisis serta akan dilihat relevansinya dengan teori-teori yang telah dijabarkan pada kerangka teori. Data yang telah dikelompokkan, disajikan dalam bentuk kutipan dan cuplikan hasil wawancara dengan informan.

Langkah-langkah yang dilakukan setelah data terkumpul adalah dengan membuat transkrip dengan menggunakan data-data yang diperoleh dari pengamatan, perekaman dengan menggunakan *tape recorder* maupun catatan yang dibuat dilapangan. Selanjutnya adalah mengolah data yang dilakukan dengan beberapa cara, yaitu *Pertama* dengan membuat pemetaan (*mapping*). Pemetaan dilakukan untuk mencari persamaan dan perbedaan klasifikasi atau variasi yang muncul dari data yang tersedia sehingga dapat ditentukan tema-tema. Cara yang *kedua* adalah proses penghubungan hasil-hasil klasifikasi atau variasi tersebut dengan teori yang berlaku dan mencari hubungan di antara sifat-sifat kategori.



BAB II

GAMBARAN UMUM KAJIAN PENELITIAN

Dalam bab dua tentang gambaran umum kajian penelitian akan diuraikan mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan tema penelitian, yaitu Deskripsi tentang partisipasi dan partisipasi politik yang diambil dari beberapa sumber. Selain itu, juga akan diuraikan tentang Deskripsi tentang purnawirawan TNI yang menjadi informan dalam penelitian ini, berikut deskripsi beberapa partai politik dimana purnawirawan TNI tersebut berpartisipasi di dalamnya, seperti Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

II. 1. DESKRIPSI PARTISIPASI DAN PARTISIPASI POLITIK

Di negara demokrasi, partisipasi lebih tinggi. Karena tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti, memahami dan melibatkan diri dalam kegiatan yang diselenggarakan negara. Pembatasan terhadap partisipasi sedikit demi sedikit dihilangkan. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah dianggap sebagai tanda yang kurang baik karena diartikan banyak warga negara tidak menaruh perhatian pada masalah kenegaraan dan ada kekhawatiran jika kurang banyak pendapat dari masyarakat, pemimpin negara akan kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat serta cenderung untuk melayani kepentingan golongan saja.²³

²³ Wiwik Suhartiningsih, "*Hubungan Budaya Politik dan Partisipasi Politik*", Skripsi, 1996:47-48.



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi didefinisikan sebagai hal ikut serta atau berperan dalam suatu kegiatan. Partisipasi dapat berarti bahwa pembuat keputusan mengikut sertakan kelompok atau masyarakat luas terlibat dalam bentuk saran atau rekomendasi, pendapat atau usulan, barang atau jasa (tenaga atau ketrampilan). Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalahnya sendiri, mengkaji pilihan sendiri, membuat keputusan dan memecahkan permasalahan sendiri.

Dalam konteks partisipasi, dua pemikir **Ivan Illich** dan **Paulo Freire** (dalam Pongtularan dan Theresia, 2002:89) punya pandangan yang kurang lebih sama, bahwa rakyat biasa harus mampu bertanggung jawab atas kepentingan dan kesejahteraan sendiri, karena itu rakyat harus diberi kesempatan untuk ikut bertanggung jawab dalam semua bidang kehidupan baik dalam bidang kesehatan, transportasi, pendidikan, politik, perencanaan pembangunan dan lain-lain. Elit pembuat keputusan harus menyadari pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. **Paulo Freire** mengetengahkan bahwa tolak ukur keotentikan pembangunan ialah rakyat yang sebelumnya hanya diperlakukan sebagai obyek yang sekedar tahu dan melaksanakan, kini diajak untuk berpartisipasi sebagai subyek aktif yang sadar dan bertindak secara aktif dalam mencapai tujuan hidupnya sendiri. (Pongtularan dan Brahim, 2002:89)

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, pemahaman tentang partisipasi perlu diperluas, bukan hanya menyangkut pemberian dana atau barang sebagai masukan instrumental, tapi juga berbagai bentuk partisipasi lain seperti partisipasi dalam hal waktu, pemikiran dan gagasan, kepercayaan dan kemauan. Partisipasi dapat



dilihat melalui peran serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program yang ingin dijalankan.

Definisi umum partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberi suara dalam PEMILU, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan kepentingan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Menurut **Samuel T. Huntington** dan **Joan M. Nelson** (1990:26), partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan maksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi politik dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal dan secara efektif atau non efektif.²⁴

Partisipasi politik dilakukan karena terdorong oleh suatu keyakinan bahwa melalui kegiatan tersebut, kepentingan dan kebutuhan akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan dan mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat.²⁵

Partisipasi politik dapat juga didefinisikan sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang

²⁴ Wiwik Suhartiningsih, *op. cit.*, hal 47.

²⁵ *Ibid.*, hal 47.



dimaksud antara lain mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan atas suatu kebijakan umum, mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal ini partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong dan mengajak para anggota masyarakat untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Jadi partai politik merupakan wadah partisipasi politik.²⁶

Partisipasi politik mempunyai batasan atau rambu-rambu yang menyangkut konseptualisasi tentang apakah suatu kegiatan termasuk ke dalam kategori partisipasi politik atau tidak. Adapun batasan atau rambu-rambu tersebut adalah *Pertama*, Partisipasi politik berupa kegiatan atau perilaku individu warga negara yang dapat diamati. *Kedua*, Kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik dan kegiatan mendukung atau menentang keputusan yang dibuat oleh pemerintah. *Ketiga*, Kegiatan yang efektif maupun tidak efektif mempengaruhi pemerintah. *Keempat*, Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara. Secara tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap mampu meyakinkan pemerintah. *Kelima*, Kegiatan mempengaruhi

²⁶ Ramlan Surbakti, "Memahami Ilmu Politik", PT. Grasindo, Jakarta, 1992, hal.118.



pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar, misalnya ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka atau menulis surat dan prosedur yang tidak wajar, berupa kekerasan dalam demonstrasi, pembangkangan halus seperti memilih kotak kosong pada pemilihan umum.

Partisipasi politik menurut **Huntington dan Nelson (1989:16-18)** dapat berwujud dalam berbagai bentuk sebagai berikut :

1. Kegiatan pemilihan, mencakup pemberian suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi calon atau tiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi proses pemilihan.
2. Kegiatan pendekatan (*lobbying*), mencakup upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintahan dan pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka yang menyangkut kepentingan sejumlah besar orang.
3. Kegiatan organisasi, berhubungan dengan partisipasi sebagai anggota atau pejabat organisasi yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
4. Kegiatan mencari koneksi, adalah tindakan perorangan yang ditujukan kepada pejabat pemerintahan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat bagi seorang atau kelompok orang.
5. Tindak kekerasan, adalah partisipasi politik yang berupa perpanjangan upaya legal untuk mempengaruhi keputusan politik. Upaya untuk mempengaruhi keputusan pemerintah ini dilakukan dengan jalan menimbulkan kerugian fisik



atau harta benda terhadap orang lain. Kekerasan dapat ditujukan untuk merubah pimpinan politik, mempengaruhi kebijakan pemerintah atau bahkan merubah sistem politik.²⁷

Milbrath (1971:12) mengemukakan beberapa klasifikasi pola partisipasi politik, yaitu :

1. Pola partisipasi politik aktif, indikatornya adalah :

- Menjadi anggota organisasi (partai) politik, organisasi profesi atau organisasi sosial.
- Menjadi pengurus organisasi sosial politik.
- Mengajukan usul, mengajukan ketidaksetujuan atau menyuarakan dukungan terhadap usulan input proses politik.
- Aktif menghadiri rapat dan kegiatan organisasi sosial politik yang di dalamnya membicarakan proses input politik.
- Menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk penyelenggaraan kegiatan politik.
- Melakukan pendekatan dengan pejabat untuk kepentingan bersama (*lobby*) dan untuk kepentingan pribadi yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak (koneksi).

2. Pola partisipasi politik pasif, indikatornya adalah :

- Penyelenggarakan diskusi, pembicaraan kelompok yang membicarakan satu kebijakan politik.

²⁷ Wiwik Suhartiningsih, *op.cit.*, hal 50.



- Menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum dan dalam organisasi politik.
- Mengajukan usul, ketidakpuasan terhadap pejabat pemerintah yang berhubungan dengan kebijakan publik.
- Mentaati peraturan yang bersifat umum, lebih khusus kebijakan dalam lingkungan kerja.

3. Pola partisipasi politik tidak aktif, indikatornya adalah :

- Tidak menghadiri rapat walaupun diundang.
- Tidak mengajukan usul, tuntutan maupun dukungan terhadap suatu yang berhubungan dengan kebijakan politik.
- Dengan sengaja tidak mentaati peraturan yang ditetapkan.
- Tidak memberikan sumbangan untuk kegiatan politik.
- Tidak menggunakan hak pilih di tingkat lokal maupun nasional.
- Tidak melakukan pendekatan dengan pemerintah walaupun dapat dilakukan.²⁸

II. 2. DESKRIPSI ADAPTASI

Dalam hal memasuki suatu lingkungan baru, baik itu lingkungan tempat tinggal, sekolah ataupun tempat pekerjaan, seseorang diharapkan untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru tersebut agar ia dapat bertahan (*survive*) sekaligus nantinya dapat mencapai tujuan atau orientasinya. Penyesuaian diri dengan lingkungan itulah yang disebut dengan adaptasi.

²⁸ *Ibid.*, hal 55-57.



Menurut Kamus Sosiologi Antropologi, adaptasi didefinisikan sebagai penyesuaian diri terhadap lingkungan, pekerjaan dan sebagainya.²⁹ Dalam kerangka bertahan (*survive*) manusia secara aktif akan mengantisipasi dan memanipulasi, dalam pengertian ia akan menggunakan atau memanfaatkan bahkan mengembangkan suatu tindakan. Selain itu juga ada usaha atau kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

Lebih lanjut, tindakan, kegiatan, atau usaha-usaha tersebut diterjemahkan sebagai suatu proses adaptasi. **J. W. Benneth** mendefinisikan proses adaptasi ini sebagai pola-pola yang dibentuk oleh berbagai penyesuaian yang direncanakan oleh manusia untuk mendapatkan sumber daya guna memecahkan masalahnya.³⁰

Adaptasi sendiri bukanlah berpola tetap menurut suatu kodrat atau sifat sistem, tapi sebagai suatu perilaku yang secara sadar dan aktif memilih dan memutuskan apa yang ingin dilakukan sebagai usaha penyesuaian diri. Ini berarti adaptasi bersifat aktif dan secara kreatif dilakukan manusia sebagai makhluk yang beradab. Di samping itu, adaptasi merupakan proses penyesuaian tingkah laku terhadap lingkungan, di mana dalam lingkungan tersebut terdapat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku.

Jadi yang menjadi kajian adaptasi di sini adalah bagaimana seorang purnawirawan TNI berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan barunya, yaitu lingkungan partai politik yang terdiri dari berbagai macam latar belakang individu, tidak hanya individu dari kalangan militer seperti pada lingkungan kerja sebelumnya, tapi juga dari kalangan akademisi, sipil,

²⁹ Kamus Sosiologi Antropologi, Penerbit Indah Surabaya, 2001, hal 10.

³⁰ A. A. Sukadana, "*Antropo-Ekologi*", Airlangga University Press, Surabaya, 1983, hal 40.



budayawan dan lain-lain. Dalam hal ini purnawirawan TNI beradaptasi terhadap nilai-nilai, aturan-aturan dan kebiasaan yang tidak ditemui sebelumnya. Dengan demikian, purnawirawan TNI tersebut beradaptasi untuk mempertahankan eksistensinya sekaligus mencapai tujuan dan agar siap menghadapi berbagai masalah atau bahkan konflik yang mungkin timbul di lingkungan partai politik.

Adaptasi juga sebagai sebab tidak langsung dari pengorganisasian individu yang meliputi mobilitas geografis, yaitu perpindahan secara fisik seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini dilihat dari alasan meninggalkan tempat kerja asal dan lama bekerja di tempat baru, juga dilihat dari motivasi pemilihan tempat kerja baru. Individu dalam beradaptasi pada akhirnya sudah tentu ingin mencapai tujuan, dan dalam usaha untuk mencapainya diperlukan suatu tindakan, di mana tindakan-tindakan itu ada yang sesuai dan ada pula yang bertentangan dengan nilai-nilai dan aturan-aturan yang terdapat pada suatu lingkungan.

II. 3. PURNAWIRAWAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)

Pengertian Purnawirawan TNI disini adalah anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah memasuki masa pensiun, di mana prajurit tersebut dinyatakan telah selesai melaksanakan kedinasan militer (purnadinas) untuk kembali ke masyarakat.³¹ Ketentuan tentang usia pensiun seorang prajurit TNI diatur dalam UU RI No. 34 tahun 2004 pada pasal 53 yang menyatakan, prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan usia 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004, hal 81.



tamtama. Hal ini hanya berlaku bagi prajurit TNI yang pada tanggal Undang-Undang ini diundangkan, belum dinyatakan pensiun dari dinas TNI.

Pelaksanaan dari ketentuan diatas diatur secara bertahap, dalam artian, tidak semua prajurit pensiun pada usia 58 (lima puluh delapan) tahun. Selanjutnya ketentuan mengenai usia pensiun itu dijabarkan sebagai berikut :

- Bagi prajurit perwira yang saat UU ini diundangkan, tepat berusia atau belum genap berusia 55 (lima puluh lima) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.
- Bagi prajurit perwira yang pada saat UU ini diundangkan, belum genap berusia 54 (lima puluh empat) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun.
- Bagi prajurit perwira yang saat UU ini diundangkan, belum genap berusia 53 (lima puluh tiga) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.
- Bagi prajurit bintara dan tamtama yang tepat berusia atau belum genap berusia 48 (empat puluh delapan) tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.

II. 4. PARTAI POLITIK

Sebelum menggambarkan beberapa partai politik di mana purnawirawan TNI berpartisipasi di dalamnya, ada baiknya jika terlebih dahulu memahami definisi atau pengertian partai politik itu. Menurut UU No. 31 tahun 2002 tentang partai politik, yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi politik yang



dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas dengan akta notaris. Akta notaris yang dimaksud harus memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) serta kepengurusan tingkat nasional. Partai politik harus didaftarkan pada Departemen Kehakiman, dengan syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki akta notaris pendirian partai politik yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- b. Mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah propinsi, 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten atau kota pada setiap propinsi yang bersangkutan dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten atau kota yang bersangkutan.
- c. Memiliki nama, lambang dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang dan tanda gambar partai politik lain.
- d. Memiliki kantor tetap.



Adapun fungsi partai politik adalah sebagai berikut :

- Sebagai sarana pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif dan program konkrit serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat.
- Sebagai sarana penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- Sebagai sarana partisipasi politik warga negara.
- Sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Pengertian lain tentang definisi partai politik, dinyatakan oleh **Lapalombara dan Weiner** adalah organisasi yang mempunyai kegiatan yang berkesinambungan, artinya masa hidupnya tidak bergantung pada masa jabatan atau masa hidup para pemimpinnya dan juga bersifat terbuka dan permanen, tidak hanya di tingkat pusat tapi juga di tingkat lokal. Jadi, ciri-ciri partai politik menurut mereka ini, antara lain adalah berakar dalam masyarakat lokal, melakukan kegiatan terus-menerus, berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan dan ikut serta dalam pemilihan umum.³²

Batasan definisi partai politik diberikan oleh **Carl Friedrich** sebagai kelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk

³² Ramlan Surbakti, *"Memahami Ilmu Politik"*, PT. Grasindo Jakarta, 1992, hal 114-115.



merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan keputusan itu akan memberikan manfaat material dan ideal kepada para anggotanya. Sementara itu, **Soltau** memberi definisi partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.³³

Dalam menjalankan organisasi, partai politik mempunyai fungsi utama yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum. Ketika melaksanakan fungsi itu, partai politik dalam sistem politik demokrasi melakukan 3 (tiga) kegiatan, yang meliputi seleksi calon-calon, mengadakan kampanye dan melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif dan/atau eksekutif). Apabila kekuasaan untuk memerintah telah diperoleh, maka partai politik itu berperan pula sebagai pembuat keputusan politik.³⁴ Berikut ini adalah beberapa gambaran atau deskripsi partai politik di mana purnawirawan TNI berpartisipasi di dalamnya.

³³ Ibid., hal 116.

³⁴ Ibid., hal 116-117.



II. 4. 1. PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)



Partai ini merupakan kelanjutan sekretariat bersama Golongan Karya yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 di Jakarta. Partai yang berazaskan Pancasila ini bersifat mandiri, terbuka, demokratis, moderat, solid, mengakar, responsif, majemuk, egaliter, serta berorientasi pada karya dan kekarya. Adapun tujuan partai ini antara lain :

- Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-Undang Dasar 1945.
- Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum dan hak asasi manusia.

Untuk mencapai tujuan di atas, tugas pokok partai ini adalah memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, hukum serta pertahanan dan



keamanan nasional guna mewujudkan cita-cita nasional. Sehubungan dengan tugas pokok tersebut, partai ini berfungsi *Pertama*, untuk menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. *Kedua*, untuk mempertahankan, mengemban, mengamalkan dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. *Ketiga*, untuk menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Partai ini mempunyai paradigma yang merupakan cara pandang partai Golkar tentang diri dan lingkungannya melalui pembaharuan internal dan eksternal dalam rangka mewujudkan tujuan partai. Visi partai Golkar adalah terwujudnya masyarakat Indonesia baru yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan bertakwa, berdasarkan hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam tatanan masyarakat madani. Adapun misi partai ini adalah *Pertama*, untuk menegakkan, mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, untuk mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera, adil



dan makmur, menegakkan supremasi hukum dan menghormati hak asasi manusia serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.

Platform dari partai ini adalah :

- a. Senantiasa berwawasan kekaryaan dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Mengembangkan wawasan kebangsaan sebagai satu-satunya cara pandang mengatasi perbedaan faham, golongan dan kelompok atas dasar suku, etnis, agama, aliran dan budaya sehingga seluruh bangsa Indonesia terhimpun dalam kekuatan besar.
- c. Mengembangkan ciri pluralisme dalam persatuan dengan menampung kemajemukan bangsa Indonesia yang terpatri dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Mempertahankan komitmen terhadap kemajuan demokrasi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
- e. Berjuang secara konsisten mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kecerdasan rakyat secara menyeluruh.
- f. Mempertahankan komitmen dalam penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dalam tata kehidupan yang demokratis dan konstitusional.
- g. Mengembangkan penghayatan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran agama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan sekaligus sebagai sumber motivasi dalam pembangunan.



Struktur organisasi partai Golkar terdiri dari tingkat pusat, tingkat propinsi, tingkat kabupaten atau kota, tingkat kecamatan dan tingkat desa atau kelurahan atau sebutan lainnya yang berturut-turut dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah Propinsi (DPD Tk.I), Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (DPD Tk.II), Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) dan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain. Kantor Dewan Pimpinan Pusat mengambil tempat di Jakarta (ibukota negara), dengan alamat Jl. Angrek Nelly Murni No.11A Jakarta Barat. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I mengambil tempat di masing-masing ibukota propinsi, untuk propinsi Jawa Timur mengambil tempat di Surabaya, dengan alamat Jl. Achmad Yani No. 311 Surabaya. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II untuk kota Surabaya bertempat di Jl. Adityawarman No. 87B Surabaya.

II. 4. 2. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP) INDONESIA



Partai ini merupakan penjelmaan dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang didirikan dan dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 9 September 2002 dengan ketua umumnya Jendral (Purn) Edi Sudrajat. Partai yang berazaskan Pancasila ini bersifat terbuka, mandiri dan menampung keanekaragaman potensi bangsa yang berasal dari semua asal-usul, suku, ras, agama, golongan, gender



dalam segala jenjang. Adapun tujuan partai ini adalah *Pertama*, untuk memperjuangkan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. *Kedua*, mewujudkan secara nyata kedaulatan rakyat atas penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. *Ketiga*, memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. *Keempat*, terciptanya kehidupan masyarakat yang berdasarkan konstitusi, hukum dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat demi terciptanya masyarakat adil, makmur, bersatu, kuat dan mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mencapai tujuan tersebut, PKP Indonesia akan melaksanakan program pokok perjuangan partai sebagai berikut :

1. Membangun dan membina kesadaran dan pengetahuan rakyat tentang hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.
2. Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam rangka menciptakan sistem politik, hukum, ekonomi dan budaya yang berkeadilan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Mempertahankan dan membina tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang memperkokoh persatuan dan keutuhan bangsa serta seluruh wilayah Republik Indonesia.
4. Menegakkan dan menjunjung tinggi hak dan kedaulatan rakyat dalam setiap langkah kebijakan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera dan mandiri, pengembangan otonomi daerah yang seluas-luasnya dan perwujudan masyarakat madani.



5. Ikut serta dan berperan aktif mempengaruhi, menentukan dan merumuskan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sehingga tercipta distribusi kekuasaan dan kewenangan publik yang berimbang dan adil diantara lembaga-lembaga negara, yang semuanya mempunyai akuntabilitas kepada rakyat.
6. Mengembangkan seluruh potensi masyarakat, bangsa dan negara untuk menjadi bangsa yang kuat dan mandiri, serta mampu berperan aktif dalam usaha mewujudkan perdamaian, keadilan dan kesejahteraan nasional.
7. Berperan aktif bersama-sama partai-partai politik, organisasi masyarakat/profesi, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat untuk secepatnya keluar dari berbagai krisis yang melanda bangsa dan negara di penghujung abad 20 dan memasuki abad 21 dengan mantap.
8. Turut serta secara aktif merumuskan dan mengimplementasikan program penyehatan perekonomian nasional yang bertumpu pada kebijakan ekonomi kerakyatan guna mampu secepatnya mengatasi dan mempersempit berbagai kesenjangan di masyarakat serta sekaligus mengangkat daya saing perekonomian nasional di tingkat global.
9. Mengembangkan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat agar menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan roda pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih profesional dan melayani kepentingan publik (*Good Governance*) yang senantiasa dapat dipertanggung jawabkan pada masyarakat luas.



10. Memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan nasional untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang menghormati kemanusiaan universal dan mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia pada pergaulan antar bangsa.

Adapun fungsi dari partai ini adalah :

- a. Wahana penampung, penyalur dan perjuangan aspirasi rakyat.
- b. Wadah pembinaan dan perjuangan untuk menumbuh kembangkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.
- c. Wadah pengembangan partisipasi dan sikap kritis masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
- d. Wadah pendidikan, pemekaran, pencerahan dan pengembangan kepemimpinan bangsa di semua tingkatan.
- e. Wahana pengkajian berbagai hal yang menyangkut aspek-aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, untuk dijadikan bahan dalam perjuangan dan partisipasi pelaksanaan pembangunan.

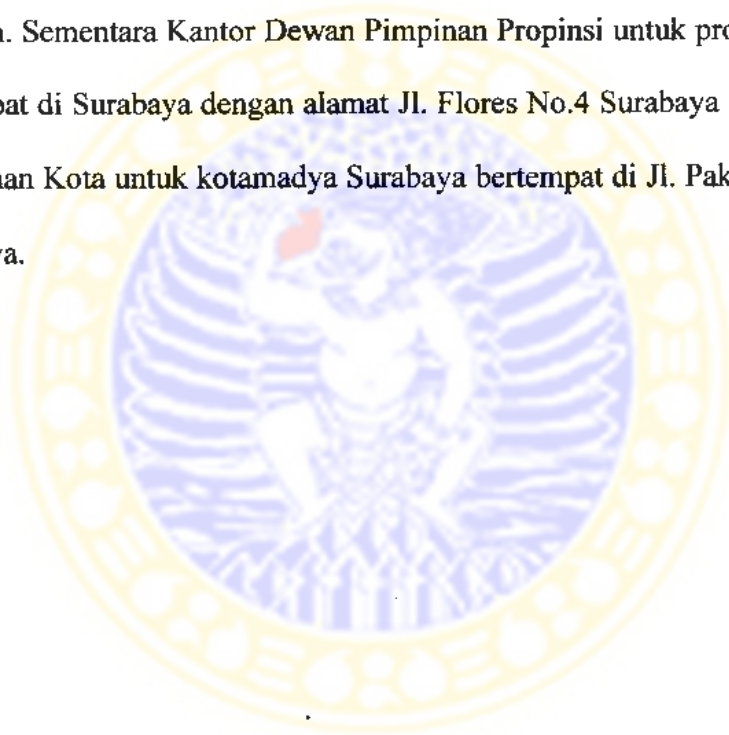
Susunan organisasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia terdiri atas :

1. Organisasi tingkat nasional yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
2. Organisasi tingkat propinsi yang berkedudukan di Ibukota Propinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Propinsi (DPP).
3. Organisasi tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan di Ibukota kabupaten/kota dipimpin oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK).



4. Organisasi tingkat kecamatan yang berkedudukan di Ibukota kecamatan, sebagai perpanjangan tangan cabang dipimpin oleh Depan Pimpinan Kecamatan (DPC).
5. Organisasi tingkat desa/kelurahan yang berkedudukan di desa/kelurahan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan (DPD).

Kantor Dewan Pimpinan Nasional bertempat di Jl. Cilandak KKO No.32 Jakarta Selatan. Sementara Kantor Dewan Pimpinan Propinsi untuk propinsi Jawa Timur bertempat di Surabaya dengan alamat Jl. Flores No.4 Surabaya dan Kantor Dewan Pimpinan Kota untuk kotamadya Surabaya bertempat di Jl. Pakis Tirtosari No.82 Surabaya.





BAB III

TEMUAN DATA

Dalam bab tiga yang berisi hasil temuan data akan dipaparkan berbagai data hasil penelitian, baik yang dihasilkan dari pengamatan maupun wawancara terhadap subyek penelitian di lapangan, yang dibagi menjadi tiga tema besar yang disesuaikan dengan analisis yang akan dilakukan.

III. 1. KARAKTERISTIK INFORMAN

1. Informan I (Pak Maksun, nama samaran)

Pak Maksun adalah seorang purnawirawan TNI AD berusia 65 tahun. Jabatan terakhir sebelum pensiun adalah Sersan Mayor. Pensiun pada usia 49 tahun (atau pada tahun 1990). Dari mulai pertama kali memasuki masa pensiun, sudah bergabung dalam Partai Golkar, meskipun masih di tingkat kelurahan. Ternyata pengalaman berorganisasinya dahulu ketika masih di TNI berlanjut sampai setelah pensiun. Awalnya bergabung dalam Partai Golkar di tingkat kecamatan dan sekarang masih aktif sampai di tingkat kotamadya sebagai sekretaris kepengurusan DPD tingkat II partai Golkar.

Pak Maksun menempuh pendidikan terakhir Secaba (Sekolah Calon Bintara) di Pusat Pendidikan Arhanutse pada tahun 1980-1981. Perjalanan karir Pak Maksun dimulai pada tahun 1961 ketika ditempatkan di provinsi Kalimantan Timur, di kota Balikpapan di Int Dam IX Mulawarman. Kemudian pada tahun 1967-1968 ditempatkan di Depo Pembekalan dan Angkutan Angkatan Darat di



Surabaya. Pada tahun 1969-1970 ditugaskan di bagian personalia sebagai Staf Tata Usaha Pemeliharaan dan Jasa Lapangan. Selanjutnya Pak Maksun menempuh pendidikan Pemeliharaan Mesin Kantor di Cimahi, Bandung pada tahun 1971-1976, yang kemudian pada tahun 1977 ditugaskan di Timor Timur di komando Logistik Daerah Pertahanan Keamanan. Pada tahun 1980 mengikuti pendidikan Secaba dan menjalankan tugas akhir di Bekangdam Kodam V Brawijaya Surabaya.

2. Informan II (Pak Bintang, nama samaran)

Pak Bintang adalah seorang purnawirawan TNI AD berusia 60 tahun, jabatan terakhir sebelum pensiun adalah Letnan Kolonel. Pensiun pada usia 55 tahun pada akhir tahun 2001 dan mulai bergabung dalam Partai Golkar sejak tahun 2004 sampai sekarang, menjabat sebagai sekretaris.

Pak Bintang menempuh pendidikan terakhir di AKABRI. Setelah lulus, ditugaskan di Batalyon 731 Maluku pada tahun 1971-1978, lalu pada tahun 1979-1981 di Kodim Maluku Tengah. Pada tahun 1981-1992 ditugaskan di Kodam V Brawijaya di Resimen Induk Infanteri militer (tahun 1981-1985) di Kodim Banyuwangi sebagai Kepala Staf Kodim (tahun 1985-1987), di Makodam V Brawijaya sebagai Staf Latihan (tahun 1987-1991) dan pada tahun 1991-1992 ditugaskan pada Resimen Induk Infanteri Militer sebagai Direktur Latihan (Dirlat) di Kodam V Brawijaya.

Pak Bintang selanjutnya ditugaskan menjadi anggota dewan di DPRD tingkat II Sidoarjo pada tahun 1997-1999. Kemudian pada akhirnya menjadi



anggota dewan di DPRD tingkat II Pasuruan sebagai wakil ketua untuk periode 1999-2004. Oleh karena tugas yang terakhir ini, akhirnya memilih untuk pensiun awal yaitu pada tahun 2001.

3. Informan III (Pak Dirman, nama samaran)

Pak Dirman adalah seorang purnawirawan TNI AD berusia 67 tahun dengan pangkat terakhir sebagai Kolonel. Pensiun pada usia 58 tahun yaitu pada tahun 1997 dan pada tahun 1998 mulai bergabung dalam Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia. Jadi sudah bergabung dalam partai tersebut selama 8 (delapan) tahun dan sekarang menjabat sebagai dewan penasehat setelah sebelumnya sempat menjadi ketua dan sekretaris di kepengurusan PKP Indonesia. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia bukanlah tempat pengalaman pertama berpartai bagi Pak Dirman. Tidak berselang lama setelah pensiun pada tahun 1997, sempat berpartisipasi di partai politik dengan menjadi salah satu pendiri Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB). Tapi karena kemudian terjadi konflik internal, maka partai tersebut dibubarkan.

Pak Dirman menempuh pendidikan terakhir di SESKOAD pada tahun 1978. Setelah itu ditugaskan di beberapa provinsi di Indonesia yang tugas utamanya adalah membina bidang teritorial sosial dan politik di provinsi Bali, NTB, NTT dan Timor Timur. Pernah juga menjabat sebagai asisten teritorial sosial politik di Kodam IX Udayana, Bali sampai terakhir sebelum pensiun ditugaskan di Kodam V Brawijaya Surabaya.



Selain berpartisipasi dalam Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Pak Dirman juga berprofesi sebagai seorang dosen Mata Kuliah Dasar Umum Kewiraan di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya dan tinggal di kediamannya di kawasan Manyar Surabaya bersama istri dan anak-anaknya.

Secara singkat, mengenai karakteristik informan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL III.1
KARAKTERISTIK INFORMAN

No.	Nama Informan (Samaran)	Pendidikan Terakhir	Pangkat	Partai	Usia Saat Pensiun	Usia Saat Ini	Lama Bergabung dalam Partai
1.	Maksum	SECABA	Sersan Mayor	Golkar	49 tahun	65 tahun	16 tahun
2.	Bintang	AKABRI	Letnan Kolonel	Golkar	55 tahun	60 tahun	2 tahun
3.	Dirman	SESKOAL	Kolonel	PKP	58 tahun	67 tahun	8 tahun



III. 2. LATAR BELAKANG BERPARTISIPASI DALAM PARTAI POLITIK

1. Informan I (Pak Maksum, nama samaran)

Pak Maksum telah berpartisipasi dalam Partai Golkar selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun sejak tahun 1990. Saat itu Golkar berjumlah menjadi suatu partai politik, hanya suatu golongan saja. Pengalamannya sejak muda memang sudah tebiasa terlibat dalam kegiatan keorganisasian dan telah melakukan kegiatan ini di banyak tempat di Indonesia, bahkan ketika masih aktif di kedinasan TNI (dulu ABRI) sekalipun. Merasa beruntung karena saat itu diberi ijin khusus oleh atasannya untuk dapat berpartisipasi dalam organisasi kemasyarakatan asalkan organisasi tersebut tidak berafiliasi dengan suatu partai politik. Dan dapat dikatakan pengalaman di organisasi sudah sangat banyak sehingga pada akhirnya dipercaya untuk mengisi posisi kepengurusan di kantor DPD tingkat II Partai Golkar di Surabaya.

"Sebenarnya saya sebelum pensiun itu sudah terpanggil untuk berorganisasi. Secara naluri ya. Saya waktu bertugas di Kalimantan Timur sudah menjadi ketua ikatan atletik Balikpapan dan sekitarnya. Tahun 66 saya kebetulan oleh masyarakat sana ditunjuk untuk menjadi ketua penyelenggara seleksi atletik daerah tingkat I provinsi Kalimantan Timur. Itu barangkali merupakan modal dasar saya terpanggil pada organisasi-organisasi sosial. Jadi itu pengalaman pertama saya di organisasi kemasyarakatan. Saat itu masih aktif di ABRI. Tapi karena ada ijin khusus dari komandan saya dibolehkan untuk berperan dalam ormas yang tidak berafiliasi dengan salah satu parpol. Setelah di Surabaya sekitar 1980, saya juga sudah dipercaya untuk jadi ketua RW di sekitar Jembatan Merah. Setelah tiga kali berturut-turut jadi ketua RW, saya dipercaya sebagai ketua LKMD. Saat itu sudah memasuki usia pensiun. Setelah saya pensiun, tiba-tiba saya ditarik oleh lurah. Ini kepanjangan tangan dari partai Golkar. Dia melihat prestasi kerja saya jadi ketua RW tiga kali berturut-turut, dia minta saya untuk menjadi ketua komisaris Golkar di tingkat kelurahan lalu naik ke kecamatan, lalu berubah menjadi pimpinan kecamatan (kecamatan krembangan, red). Saya jadi sekretaris



dulu, kemudian saya dipercaya menjadi ketua sampai ada Musda pada tahun 2005 yang lalu. Kebetulan saya masuk dalam kepengurusan partai Golkar di tingkat kotamadya Surabaya. Saya mulai dari bawah, itu prosesnya sehingga saya bisa sampai di sini sekarang."

Sama halnya dengan informan lainnya, Pak Maksu juga kurang mendapat dukungan dari pihak keluarga, terutama dari pasangan pada saat awal berkecimpung dalam partai politik.

"Respon awal memang ada ketidaksenangan dari istri saya, karena waktu yang dibuang untuk pengabdian di organisasi politik ini kan tanpa ada suatu imbalan (materi, red). Memang ada reaksi tidak suka dari istri yang dilakukannya waktu itu ya terus-menerus menelpon, menyuruh saya lekas pulang sambil marah-marah. Dia bilang ngapain saya kok disini (kantor DPD Tk.II Partai Golkar, red) terus, nggak dapat apa-apa saja kok tetap disini. Yang dia maksud nggak dapat apa-apa itu nggak ada duit atau imbalannya, hahaha.. (tertawa, red)."

Tetapi setelah Pak Maksu memberi pengertian, sang istri dapat memahami bahwa berpartisipasi dalam Partai Golkar sudah merupakan panggilan nurani Pak Maksu. Walau bagaimanapun Pak Maksu tetap akan melakukannya.

"..Ya tapi setelah saya jelaskan, kasih dia pengertian bahwa ini adalah panggilan hati nurani saya untuk bergabung disini (Partai Golkar, red) jadi ini sudah nggak bisa tidak saya lakukan, biarpun bagaimana keadaannya, saya akan tetap begini."

Akhirnya istri Pak Maksu dapat mengerti kebutuhan dan keinginan suaminya untuk berpartisipasi dalam Partai Golkar.

"Akhirnya istri saya dapat menerima penjelasan saya dan membiarkan saya tetap disini. Buktinya sampai sekarang ini tidak ada bel-bel (telepon, red) dari rumah menyuruh saya pulang, hahaha.. (tertawa, red). Andaikan tidak menerima, pasti selama wawancara ini, dia pasti sudah 2 atau 3 kali menelpon menyuruh saya pulang, hahaha.. (tertawa, red)"



Pak Maksu kemudian bercerita tentang perasaannya ketika pada masa orde baru, pemerintah pada saat itu mengharuskan keluarga ABRI untuk memilih Golkar.

"Sebenarnya bukan kewajiban tapi hanya sebatas himbauan saja. Tapi selalu saya tekankan pada anak dan istri saya bahwa asas pemilu itu kan jujur, adil dan rahasia sifatnya. Jadi kalau sudah ada di dalam TPS, menusuk kertas pilih dengan gambar apapun, tidak ada yang tahu apa yang dipilih. Tidak ada paksaan. Cuma kebetulan anak dan istri saya memang ingin memilih Golkar."

Selain karena memang senang berorganisasi sedari sebelum pensiun, Pak Maksu juga mempunyai pertimbangan khusus dalam memilih Partai Golkar sebagai tempat berpartisipasi dalam partai. Pertimbangannya adalah karena perjuangan ABRI pada saat itu sama dengan perjuangan Golkar. Dengan begitu pengabdian sebagai anggota prajurit ABRI dapat diteruskan dengan berpartisipasi di dalam Partai Golkar.

"Saya melihat Golkar itu, program dan tujuannya pada waktu itu seiring dan sejalan atau hampir sama dengan program dan tujuan ABRI. Dengan adanya kesamaan itulah makanya saya tertarik untuk berorganisasi pada Partai Golkar. Saat itu, Golkar belum mendeklarasikan diri sebagai suatu partai politik, hanya sebagai suatu golongan saja, tapi setelah adanya deklarasi paradigma baru Golkar pada tahun 98, kemudian berubah menjadi suatu partai politik. Perjuangan ABRI sama dengan perjuangan Golkar. Nah, kalau sama mengapa saya tidak meneruskan perjuangan itu. Artinya, pengabdian saya sebagai anggota militer setelah tidak aktif di kedinasan tidak harus putus sampai disitu. Mengapa tidak saya teruskan saja perjuangan kalau itu memang sama, ya kan? Yah, itu tadi sedikit cerita kenapa saya tertarik untuk bergabung di partai ini."

Pak Maksu juga mengungkapkan bahwa Partai Golkar merupakan sarana penyaluran aspirasi yang mempunyai etika dan moral, tidak seperti partai lainnya.



Baginya , Partai Golkar adalah satu-satunya pelopor untuk berjuang dengan tetap mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar perjuangannya.

“Saya memandang partai ini sebagai penyalur aspirasi itu yang pasti. Aspirasi perjuangan yang tercermin dalam visi dan misi yang jelas dan mantap serta memiliki etika dan moral. Tak seperti partai-partai lain yang saya nilai kurang memiliki itu. Dulu pada saat Golkar dihujat habis-habisan oleh masyarakat atau kelompok kepentingan tertentu, bahkan ada yang sampai membakar sebagian gedung kantor, kita tidak mebalas dendam dengan tindakan anarkhis. Ini membuktikan Golkar memiliki etika dan moral dalam perjuangan aspirasinya. Selain itu, saya ini orang yang dari dulu suka berorganisasi jadi disini mempunyai makna mendalam bagi saya karena dari kesukaan tersebut, saya sekaligus dapat mengabdikan dan berjuang menyalurkan aspirasi saya. Golkar bagi saya merupakan satu-satunya pelopor untuk tetap berjuang mempertahankan Pancasila dan UUD 45 sebagai dasarnya.”

2. Informan II (Pak Bintang, nama samaran)

Pak Bintang sudah berpartisipasi dalam Partai Golkar selama dua tahun sejak tahun 2004. Kegiatan Pak Bintang setelah memasuki masa pensiun adalah langsung diminta bantuannya oleh atasannya pada saat masih aktif di TNI untuk membantu kepengurusan Partai Golkar di kota Surabaya. Adapun alasan memilih untuk berpartisipasi di dalam partai politik setelah pensiun adalah karena merasa ini sebagai panggilan tugas, sebagai bentuk pengabdian agar dapat lebih menyatu dengan masyarakat. Selain itu juga karena ingin bersilahturahmi.

“Alasan saya berpartisipasi di partai itu ya karena atasan minta bantuan saya untuk membantu di kepengurusan dan saya merasa ini juga panggilan tugas karena meskipun saya sudah pensiun, saya tetap menghargai beliau sebagai atasan saya. Bisa dibilang ini bentuk pengabdian saya-lah terhadap Partai Golkar yang dulu memang dibina oleh TNI. Selain itu ya sekalian masih tetap bisa bersilahturahmi dengan kader-kader baru dan menyatu dengan masyarakat.”



Pada awalnya, Pak Bintang memang sudah ingin menghabiskan masa-masa pensiunnya di Partai Golkar karena ingin mengabdikan pada partai ini.

“Ketika saya akan pensiun, memang diberi kebebasan untuk memilih ingin melakukan apa setelah pensiun. Tapi untuk saya pribadi, secara naluri, saya ingin bergabung dalam partai Golkar, karena ingin mengabdikan pada partai yang selama ini sudah melekat dan seiring sejalan dengan TNI dalam berjuang. Nah.. kebetulan, saat itu atasan saya memberi petunjuk agar saya membantu di sini (Golkar, red) saja dan saya diberi tempat dalam kepengurusan partai sebagai sekretaris.”

Pada awal Pak Bintang menyatakan maksudnya untuk bergabung dalam partai, kurang mendapat dukungan dari keluarga khususnya istri dan anaknya.

“Istri saya dulu suka komplain kalau saya pulang larut malam mengurus rapat. Dia nelson terus, tanya kok nggak pulang-pulang, anak-anak juga ikut komplain karena melihat ibunya jadi khawatir terus sama saya. Yah.. biasalah khawatir kalau saya kecapekan terus nanti sakit. Tapi setelah saya jelaskan, saya kasih pengertian, mereka bisa maklum kok.”

Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, terkadang Pak Bintang menerima respon negatif juga dari keluarganya.

“Mereka suka bilang, Pak, kalau sudah pensiun itu mbok ya di rumah saja, melakukan hobi, mengurus rumah atau ngemong cucu. Tapi saya tidak ingin sisa hidup saya hanya habis di rumah. Mumpung saya masih kuat berorganisasi, saya ingin berorganisasi. Pengabdian tidak boleh berhenti hanya karena saya sudah pensiun.”

Pak Bintang lalu menjelaskan pada keluarga dan akhirnya sekarang keluarga mendukung apapun yang ingin dilakukannya. Hal yang sama juga dilakukannya pada saat menjelang pemilihan umum sewaktu masa orde baru yang mengharuskan keluarga ABRI untuk memilih Golkar. Pak Bintang juga memberi



pengertian dan penjelasan sehingga akhirnya istri dan anak-anaknya tidak merasa terpaksa memilih Partai Golkar.

“..Yah saya jelaskan pada mereka bahwa ABRI merupakan pembina yang membidangi embrio Golkar. Jadi sebenarnya, nilai-nilai yang saya ajarkan pada anak-anak itu ya nilai-nilai yang saya dapat sebagai anggota ABRI, bukan otoriter lho ya.. Tapi sesuai dengan Pancasila dan UUD 45 yang juga merupakan landasan Partai Golkar. Istri saya juga kan aktif di Persit (Chandra Kirana, red) jadi ya sudah sejalan.”

Seperti telah dikatakan tadi, bahwa Pak Bintang memilih bergabung dalam Partai Golkar karena ingin mengabdikan pada partai tersebut. Selain itu ada pertimbangan khusus yang membuatnya semakin yakin memilih Partai Golkar yaitu ingin membina kader-kader baru untuk dapat mencapai tujuan bersama sehingga jangan sampai keluar dari jalur yang nantinya dapat mencemari nama baik partai yang berlambang pohon beringin tersebut.

“..Saya juga ingin mengawal partai golkar pada sasaran yang ingin dicapai, jangan sampai nanti melenceng atau keluar jalurnya. Saya bilang gini karena tidak munafik ya, kadang-kadang ada beberapa kepentingan dari kader yang saling bertabrakan dan kadang-kadang kepentingan itu hanya untuk kepentingan pribadi saja. Hal-hal semacam itu perlu dibina jangan sampai terjadi agar tujuan utama partai ini ndak melenceng. Kalau sudah melenceng nanti citra golkar di masyarakat ikut jelek.”

Pak Bintang memandang citra Partai Golkar sudah semakin baik karena melibatkan masyarakat luas dengan visi dan misinya yang baru namun masih tetap sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

“Saya memandang partai golkar itu seperti anak yang perlu dibesarkan, dibina, dibimbing, agar dapat mencapai tujuan bersama orang-orang banyak. Juga sebagai sarana menyalurkan aspirasi. Aspirasi sesuai dengan keinginan saya. Maknanya bagi saya sebagai penyalur aspirasi dan sebagai tempat aktualisasi diri. Karena kan kalau saya terus aktif di luar rumah, saya bisa bertemu banyak orang, bersilahturahmi yang katanya bisa memperpanjang usia, hahaha.. (tertawa, red) Sekarang



citranya sudah semakin baik, saya rasa, dengan adanya reformasi, Golkar juga mengadakan perubahan-perubahan, jadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Visi dan misinya lebih untuk kesejahteraan masyarakat serta kesatuan dan persatuan bangsa, sesuai dengan apa yang diperjuangkan oleh TNI."

3. Informan III (Pak Dirman, nama samaran)

Pak Dirman sudah berpartisipasi dalam Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia selama 8 (delapan) tahun sejak tahun 1998. Memilih kegiatan untuk berpartai setelah memasuki usia pensiun karena pada dasarnya karena ingin berjuang. Mempunyai jiwa nasionalisme dan idealisme yang tinggi dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara dan merasa prihatin pada kehidupan berpolitik di Indonesia saat ini.

"Sebetulnya saya memutuskan untuk berpolitik itu karena ingin berjuang. Maksud saya dengan berjuang itu saya ingin setidaknya mulai meluruskan dan memperbaiki nilai-nilai dan tujuan utama dari Pancasila dan UUD 45 yang sekarang ini sudah banyak melenceng dari aslinya dalam konteks berbangsa dan bernegara. Buktinya adalah pancasila sudah ingin dihapuskan, tidak digunakan lagi sebagai ideologi bangsa, kemudian UUD 45 pun diamandemen. Padahal jika kita lihat, tak ada yang salah pada Pancasila dan UUD 45, yang salah hanyalah pada person yang telah memelencengkannya. Pada masa yang waktu itu ramai-ramai terjadi demonstrasi sehingga Pancasila dan UUD 45 juga harus ikut dihilangkan karena dianggap produk pada jaman itu. Nah, dari situ saya berpartai karena tergerak setelah melihat kehidupan berpolitik di Indonesia itu sudah tidak sesuai lagi dengan Pancasila dan UUD 45, sudah melupakan kasih-mengasahi terhadap sesama, tidak ada lagi rasa persatuan dan kesatuan. Masing-masing sibuk memikirkan bagaimana mereka bisa mencapai kepentingan kelompok atau pribadi saja, jadi ajang cari duit."

Kemudian Pak Dirman menceritakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah pensiun dari TNI sebelum berpartisipasi dalam Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Pak Dirman adalah seorang dosen di sebuah Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya mengajar mata kuliah Kewiraan. Sebelum



berpartisipasi di PKP Indonesia, bersama teman-teman pernah ikut mendirikan suatu partai politik, yaitu Partai Demokrat Kasih Bangsa (PDKB) dan dipercaya menjadi ketuanya. Tapi setelah beberapa saat berdiri, terjadi konflik internal dalam tubuh partai tersebut yang menyebabkan partai ini akhirnya dibubarkan.

“Saya bersama teman-teman sempat ikut andil dalam mendirikan sebuah partai yaitu Partai Demokrasi Kasih Bangsa, disingkat PDKB yang lalu saya dipercayakan untuk menduduki posisi sebagai ketuanya. Yang melatar belakanginya ya seperti yang sudah saya bilang tadi, dalam berpolitik sudah tidak ada lagi saling menghargai, saling mengasihi, hanya cari duit saja. Setelah berjalan beberapa waktu, ternyata hal yang sama terjadi juga pada partai PDKB ini. Orang-orang di dalamnya jadi pada berebut posisi, sikut-sikutan dan semakin lama konflik yang terjadi makin runcing, sampai pada akhirnya PDKB dibubarkan.”

Setelah PDKB bubar, Pak Dirman ternyata tidak jera untuk berpartai, tetap menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang mempunyai hasrat berorganisasi yang sama, misalnya dengan tetap mengikuti diskusi-diskusi membicarakan beberapa partai yang terlihat menonjol dan bagus visi dan misinya. Pak Dirman memang sudah ada niatan untuk bergabung dalam suatu partai politik sampai pada suatu waktu seorang kawan menyebut nama PKP Indonesia yang diprakarsai oleh Bapak Jendral (Purn) Edi Sudrajat yang dulunya pernah menjadi Panglima ABRI. Oleh karena diskusi itulah akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam PKP Indonesia.

“Awalnya dulu hanya sebatas omong-omong, ngobrol, kalau istilah inteleknnya adalah diskusi-lah dengan kawan-kawan pensiunan TNI tentang rame-rame mau masuk partai apa. Nah, terus ada beberapa kawan yang membahas partai ini, pendirinya adalah Pak Edi Sudrajat yang dulunya adalah sebagai Panglima ABRI. Saat itu juga saya langsung mengatakan Bagus! Karena jika pendirinya dulu seorang Pangab, pasti visi dan misinya jelas solid dan melenceng dari Pancasila dan UUD 45. Dan yang paling penting beliau mempunyai pandangan yang sama



dengan saya dalam hal nilai juang tinggi, karena beliau juga berasal dari militer. Jabatan panglima itu tidak main-main."

Setelah berdiskusi dengan keluarga, akhirnya Pak Dirman memutuskan untuk berpartisipasi di dalam PKP Indonesia. Dari awal beliau sudah mendapat dukungan dari istri karena sang istri sangat memahami suaminya yang ingin tetap berjuang untuk idealismenya. Putra-putra Pak Dirman pun mendukung saja keputusan itu.

"Dari awalnya istri dan anak-anak sudah mendukung keputusan saya karena istri saya tahu betul saya ini orangnya sangat idealis. Anak-anak juga begitu, hanya bedanya anak-anak mikirnya sih biar bapak nggak di rumah saja, biar ada kegiatan katanya."

Tetapi ada kalanya istri Pak Dirman mengeluh tentang kegiatan berpartai suaminya, yaitu apabila Pak Dirman tidak bisa mengatur uang pensiun karena terpakai dalam jumlah banyak untuk keperluan partai.

"..Tapi memang kadang-kadang istri juga mengeluh kalau belum sampai akhir bulan saya sudah tidak punya uang lagi, udah kehabisan duit buat keperluan di partai, hahaha.. (tertawa,red). Memang kalau purnawirawan TNI berpartai, lebih banyak rugi finansial daripada untungnya. Uang pensiun itu biasanya memang hanya cukup untuk uang belanja sehari-hari, jadi kalau sudah habis pas tengah bulan, istri suka agak marah. Tapi tidak sampai melarang saya berpartai lagi. Biasanya saya bilang sama dia, kalau perjuangan itu butuh pengorbanan dan dia akhirnya mengerti."

Kemudian Pak Dirman menceritakan bahwa partisipasinya di PKP Indonesia ini bukanlah karena ingin terbebas dari paksaan pemerintahan orde baru yang mengharuskan pensiunan TNI dan keluarga TNI memilih Golkar. Menurutnya, jika di dalam Golkar tidak terjadi konflik internal dan masih mempunyai paradigma seperti dulu pada saat masih aktif, bisa saja ia memilih



berpartai di Golkar. Dan memang dulu, keluarga beliau tidak merasa terpaksa memilih Golkar karena memahami konsekuensi suami dan bapaknya adalah seorang prajurit ABRI.

“..Kalau tentang itu saya rasa biasa-biasa saja, bukan karena dulu nggak bisa ke partai selain Golkar, lantas saya sekarang berpartai di selain Golkar. Justru dulu itu saya mendukung perjuangan Golkar. Sebelum reformasi dan sebelum Golkar berubah paradigmanya. Karena Golkar sekarang berbeda dari yang dululah makanya saya tidak tertarik lagi dengan Golkar. Saya merasa perjuangan pada masa orbalah yang sesuai dengan didikan dan gemblengan yang saya dapat dari ABRI. Keluarga saya pun begitu, dulu tidak merasa terpaksa memilih Golkar karena menyadari, selain itu adalah konsekuensi, mereka mendukung perjuangan Golkar pada saat itu.”

Setelah bercerita panjang lebar, akhirnya Pak Dirman menyadari bahwa makna PKP Indonesia sangat dalam baginya. PKP sebagai tempat untuk berjuang mencapai apa yang dicita-citakan TNI pada saat masih aktif. Beliau melihat citra partai yang baik ada hubungannya dengan citra pendirinya yaitu Bapak Jendral (Purn) Edi Sudrajat.

“Saya menilai partai ini sangat baik. Citra partai ini tidak dapat dilepaskan dari citra pendirinya yaitu Pak Edi Sudrajat. Saya memberi makna yang dalam bagi partai ini, yaitu sebagai tempat saya melanjutkan perjuangan TNI mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 45.”

Untuk memahami latar belakang purnawirawan TNI yang berpartisipasi dalam partai politik, seperti yang tersaji dalam tabel dibawah ini :



TABEL III.2

LATAR BELAKANG PARTISIPASI PURNAWIRAWAN TNI
DALAM PARTAI POLITIK

No.	Nama Informan (Samaran)	Tahun Mulai Bergabung dalam Partai	Alasan Berpartisipasi dalam Partai Politik	Respon Keluarga	Makna Partai Politik
1.	Maksum	1990	Merasa terpanggil untuk mengabdikan	Pada awalnya tidak setuju tetapi kemudian memaklumi	Sebagai penyalur aspirasi perjuangan yang memiliki visi yang jelas dan mantap, beretika dan bermoral. Terdapat beberapa kesamaan tujuan antara partai politik dan TNI
2.	Bintang	2004	Diminta oleh atasannya membantu di kepengurusan partai dan karena ingin mengabdikan	Pada awalnya tidak setuju tetapi kemudian memaklumi	Sebagai penyalur aspirasi dan sebagai tempat untuk mengaktualisasi diri
3.	Dirman	1998	Ingin memperjuangkan aspirasi sesuai dengan semangat nasionalisme dan idealismenya	Setuju	Sebagai tempat melanjutkan perjuangan TNI dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia



III. 3. ADAPTASI PURNAWIRAWAN TNI DALAM PARTAI POLITIK

1. Informan I (Pak Maksun, nama samaran)

Dalam berpartisipasi di Partai Golkar, Pak Maksun menduduki posisi sebagai sekretaris di kepengurusan tingkat kotamadya. Kegiatannya di sini meliputi membuat konsep-konsep program kerja untuk membangun partai di masa yang akan datang agar dapat menarik simpati dari masyarakat, membuat program-program yang dapat dinikmati oleh orang banyak, memberi masukan dalam rapat, membuat perencanaan-perencanaan pelaksanaan program.

“Kegiatan saya banyak sekali, jadi mencakup bagaimana kita membangun partai ini ke depan, menarik simpati masyarakat, membuat program yang bisa dinikmati banyak orang seperti mendirikan koperasi. Lalu kegiatan dalam rapat memberi masukan pada pimpinan apa yang sebaiknya dilakukan, termasuk kapan suatu program dapat dilaksanakan dan berapa dana yang dibutuhkan. Banyak juga di bidang perencanaan.”

Selama beberapa tahun Pak Maksun berpartisipasi di partai ini, diakui memang ada perbedaan atmosfir kerja antara lingkungan sipil dan militer. Menurutnya itu wajar tidak sampai membuatnya terkejut karena sebelumnya sudah aktif berorganisasi di Golkar pada level yang lebih rendah, tingkat kelurahan dan kecamatan, jadi sudah terbiasa dengan situasi ini.

“Saya pikir tidak banyak perbedaan tapi memang ada yang sangat terlihat bedanya, yaitu dulu saat masih dinas, disiplin sangat ditekankan dan perintah atasan bersifat komando, apa kata atasan harus dilakukan. Meski hati grundel tapi mulut berucap siap komandan. Disini tidak, kita bebas mengekspresikan diri. Bila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati, kita bisa mengatakannya. Nah, adaptasi pertama itu kebetulan sudah saya lakukan pada saat masih jadi pengurus di tingkat kelurahan sehingga sekarang disini sudah cepat sekali menyesuaikan diri dengan mereka-mereka ini. Jadi ada semacam komformisme.”



Hal ini lalu berhubungan dengan interaksi Pak Maksam dengan orang-orang di partai ini. Kemudahannya dalam bergaul, selalu mengembangkan tenggang rasa, membuat beliau mudah bekerja sama dengan orang-orang di partai.

“Hubungan saya dengan orang-orang disini baik-baik, saya ini pada dasarnya cepat bergaul, paling cepat menangkap perasaan orang lain karena pengalaman saya dulu selalu mengembangkan tenggang rasa, apa yang dia rasakan kalau bisa juga saya rasakan. Itu mungkin sebabnya mereka menerima saya dan mau bekerjasama dengan saya.”

Tetapi dalam kepengurusan Partai Golkar di tingkat kotamadya, Pak Maksam merasakan adanya persaingan untuk menduduki suatu posisi sebagai pengurus yang kemudian menjurus ke arah terjadinya konflik.

“Di sini pada umumnya orang-orang mempunyai latar belakang pendidikan S1 atau S2 ada yang menduduki posisi di bawah saya. Sedangkan saya yang punya latar belakang militer hanya lulusan Secaba setara SLTA, ini menimbulkan bibit persaingan. Ada yang berpikir kalau Pak Maksam yang lulusan setara SLTA bisa jadi sekretaris, kenapa yang lulusan S1 cuma dapat posisi di bawahnya. Setelah itu dalam rapat biasanya orang tadi mengutarakan pendapatnya dan berdebat dengan saya. Terkadang hal ini menyulut suatu konflik. Wujudnya adalah hal-hal menjengkelkan seperti sikap tidak menghormati saya, membeda-bedakan dan mempermasalahkan latar belakang seseorang.”

Bila sudah timbul suatu konflik semacam itu, biasanya Pak Maksam mengajak orang itu bicara dan memberi pengertian bahwa posisi seseorang dalam kepengurusan itu tidak semata berdasarkan latar belakang pendidikan saja tapi juga sikap mental dan talenta seseorang dalam berorganisasi.

“Saya ajak omong dia untuk bisa menyelesaikan perselisihan antara saya dengan dia. Saya beritahu kalau pengalaman seseorang juga diperhitungkan tidak cuma latar belakang pendidikannya saja.”



Pak Maksu dalam menyesuaikan diri dalam lingkungan partai tidak menemui hambatan yang signifikan. Hal itu disebabkan karena memang sudah terbiasa berorganisasi dengan orang-orang berlatar belakang non-militer. Dan bersyukur mendapatkan keuntungan yang bersifat batiniah walaupun tidak mendapat keuntungan material, yaitu rasa bangga atau *prestise*.

“Keuntungan material itu tidak ada tapi keuntungan yang bersifat kejiwaan itu ada, yaitu rasa bangga diri. Itu kan memang tidak bisa diukur dengan rupiah. Kadang untuk mendapatkan rasa bangga ini kita justru berkorban finansial.”

Lalu Pak Maksu mengatakan bahwa sebenarnya tujuan berpartisipasi di Partai Golkar ini adalah untuk memenuhi kebutuhan batin yang berhubungan dengan kebanggaan. Dengan posisinya yang menjadi sekretaris Golkar sudah menjadi kebanggaan tersendiri dan tidak ada keinginan atau ambisi untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif.

“Tujuan saya pribadi adalah untuk memenuhi kebutuhan batin yang berhubungan dengan rasa bangga tadi. Menjadi sekretaris disini saja saya sudah sangat bangga. Tidak ada keinginan saya untuk dicalonkan atau berambisi ke arah sana.”

Tapi Pak Maksu masih mempunyai tujuan lain yang masih belum dicapainya, yaitu ingin lebih banyak memberikan sumbangsih terhadap Partai Golkar. Tujuan akhirnya tetap sama yaitu untuk mendapatkan *prestise* jika sumbangsihnya tersebut diterima.

“Sebenarnya masih ada beberapa hal karya saya yang belum saya sumbangkan untuk partai ini karena masih belum sempurna. Mudah-mudahan nanti setelah ada beberapa konsep yang saya sumbangkan pada partai ini diterima sebagai program kerja, saya akan lebih bangga lagi.”



Pak Maksu lalu menambahkan bila sudah berupaya tapi tujuan tadi belum dapat dicapai, maka akan terus belajar untuk mengejar ketertinggalannya sehingga pada akhirnya tujuan tersebut dapat tercapai.

“Bila belum dapat tercapai tentunya saya masih harus tetap terus belajar dan mengejar ketertinggalan saya untuk dapat menyumbangkan karya terhadap partai ini. Belajar dengan banyak membaca dan belajar dari pengalaman selama saya berorganisasi.”

2. Informan II (Pak Bintang, nama samaran)

Dalam berpartisipasi di Partai Golkar, Pak Bintang menduduki posisi sebagai sekretaris dalam kepengurusan di tingkat kotamadya. Kegiatannya di sini meliputi mengatur administrasi, jadwal kegiatan, jadwal rapat, membuat undangan dan membuat notulen dalam rapat.

“Kegiatan saya disini ya kegiatan biasanya sekretaris-lah, seperti mengatur administrasi, mengatur jadwal kegiatan, membuat jadwal rapat, membuat surat undangan untuk kepentingan rapat dan membuat notulen rapat. Bisa dibilang sebagai motornya partai.”

Selama dua tahun Pak Bintang berpartisipasi dalam Partai Golkar, dirasakan ada perbedaan atmosfer kerja jika dibandingkan pada saat beliau masih aktif di kedinasan.

“Ya memang berbeda sekali antara lingkungan sipil dan militer itu. Dilihat dari tingkah lakunya, kalau di militer harus selalu tercipta suasana harmonis, tidak boleh ada arogansi, harus disiplin di segala hal dan selalu menghormati senior. Jadi ada kehierarkian yang harus dihormati. Lain halnya disini, lebih bebas mengeluarkan pendapat, tidak mepedulikan hierarki, disiplinnya juga kurang.”

Tapi walaupun dirasakan adanya perbedaan, tapi interaksi yang terjadi dengan orang-orang di partai dapat berlangsung dengan baik, walaupun terkadang



terjadi persaingan dalam merebut suatu kedudukan dan tidak jarang pula sampai terjadi konflik.

“Perbedaan memang saya rasakan, tapi berusaha maklum sajalah. Dengan sikap bisa memaklumi ini menjadikan hubungan saya dengan mereka bisa baik. Mereka sebenarnya enak diajak bekerjasama, misalnya saling mendukung usulan program yang diajukan karena mereka jadi respek sama saya. Tapi ada juga yang bekerjasama hanya untuk cari muka dan simpati saja. Memang tidak terlihat secara nyata tapi bisa dirasakan adanya persaingan untuk dapat menduduki posisi tertentu. Ini disebabkan karena masing-masing individu punya keinginan dan maksud yang berbeda-beda. Ini terlihat dalam rapat atau kegiatan-kegiatan partai. Terkadang juga dari situ bisa menimbulkan konflik. Hal ini pernah terjadi pada saya, maksud saya ingin mengademkan suasana, malah dituding-tuding sambil dia itu mengeluarkan kata-kata kasar. Tapi sekarang sudah terbiasa tidak kaget lagi.”

Diakui Pak Bintang, sikap-sikap seperti diatas tadi terkadang membuatnya merasa tidak nyaman dalam bekerja. Beberapa kali mengalami ketidaknyamanan hanya karena orang tersebut tidak senang karena Pak Bintang menjadi sekretaris. Ketidaksukaan itu diekspresikan dengan sikap selalu mencari-cari kesalahan, lalu dalam rapat berargumentasi dengan nada tinggi dan mengacung-acungkan jari padanya.

“Biasanya terlihat kalau sudah ada rapat. Wah itu mulai ketahuan sifat asli orang per orang. Ada yang selalu mencari-cari kesalahan sehingga apapun yang saya perbuat selalu salah. Saat berdebat menggunakan kata kasar dan jarinya nuding-nuding ke muka saya. Tapi setelah rapat, dia meminta maaf pada saya dan hubungannya jadi baik lagi, meskipun sempat membuat saya tidak nyaman dengan sikapnya.”

Dalam proses beradaptasinya, Pak Bintang merasakan hambatan yang ditemui selama menyesuaikan diri adalah mengenai disiplin waktunya. Banyak sekali orang-orang di dalam partai yang kurang bahkan tidak menghargai waktu



sehingga seringkali harus membuat ulang jadwal rapat atau pertemuan agar dapat berfungsi secara efektif.

"Salah satu hambatan yang saya rasakan dalam menyesuaikan diri adalah masalah disiplin waktu. Saya tidak terbiasa datang terlambat tapi kalau saya komplain ke mereka yang sering telat itu saya lalu dibilang saklek, tidak punya toleransi. Toleransi saya berikan kalau telatnya itu 5-15 menit lah, bukannya 1-2 jam. Sering saya harus membuat ulang jadwal rapat atau pertemuan supaya bisa efektif."

Selain itu juga orang-orang yang selalu mengkritik segala sesuatu yang dikerjakannya sehingga Pak Bintang merasa apapun yang dikerjakan selalu saja salah.

"Ada juga orang-orang yang selalu mencari-cari kesalahan saya, misalnya dalam membuat undangan. Saya membuat undangan dengan settingan lama. Dulu-dulu tidak pernah ada masalah dengan format atau settingan lama tapi tiba-tiba dikritisi. Terkadang hanya karena untuk kepentingan pribadi seseorang, saya disalah-salahkan terus. Apa yang saya kerjakan seperti tidak ada benarnya."

Tapi Pak Bintang punya cara sendiri untuk mengatasi hambatan seperti ini. Biasanya pada saat santai, mengajak bicara orang itu dari hati ke hati apa yang membuatnya tidak suka padanya. Jika tidak berhasil, Pak Bintang segera menghubungi badan penasihat partai untuk menjadi penengah agar masalah bisa diselesaikan dengan baik.

"Saya ajak dia bicara dari hati ke hati, kalau tidak mau ya terpaksa saya panggil dewan penasihat untuk ikut membantu menyelesaikan masalah sebelum menjadi besar."

Biar bagaimanapun, Pak Bintang merasa sangat senang bisa berpartisipasi dalam partai ini. Keuntungan yang ia peroleh mungkin secara finansial tidak ada, tapi keuntungan yang sifatnya batiniah yang diperoleh.



“Keuntungan yang saya rasakan hanya sebatas kepuasan batin semata, bila calon sukses menjadi anggota legislatif. Kemudian saya dapat bertemu dan berinteraksi dengan orang baru yang lebih variatif latar belakangnya. Bergaul dengan lebih banyak orang. Saya bisa bersilaturahmi dengan mereka bisa membuat usia lebih panjang, hahaha.. (tertawa, red).”

Kemudian Pak Bintang mengatakan bahwa sebenarnya tujuan berpartisipasi di Partai Golkar ini adalah ingin bersilaturahmi, bertemu atau bergaul dengan banyak kader baru, dapat menjadi penyelenggara dan mengantarkan calon pada kesuksesan. Tidak memiliki ambisi untuk dicalonkan karena merasa usianya sudah lanjut dan cukup bersyukur masih dapat mengaktualisasikan dirinya dalam berorganisasi, dalam hal ini sebagai sekretaris di Partai Golkar.

“Saya tidak punya tujuan untuk nanti bisa dicalonkan atau apa, Cuma ingin bersilaturahmi saja. Mengantarkan calon sampai sukses mencapai tujuan partai itu menjadi kebanggaan juga. Tapi kalau untuk jadi calon legislatif tidak ada ambisi ke sana. Saya sudah tua, sudah 60 tahun, jadi sekretaris di sini sudah sangat bersyukur.”

Untuk dapat mencapai tujuan mengantarkan anggota untuk menjadi calon legislatif, Pak Bintang melakukan upaya bersama pengurus lain membekali dengan pengetahuan, kepemimpinan kepartaian dan menyusun program kerjasama dengan pengurus bidang-bidang terkait. Dan bila semua itu telah dilakukan tetapi belum dapat mencapai tujuan, beliau lebih menyerahkan keputusan pada kesepakatan bersama tapi masih sesuai dengan prosedur yang ada.

“Kalau segala upaya sudah dicoba ya kembali pada kesepakatan tim saja, asalkan masih sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu sesuai mekanisme dalam partai seperti rapat pleno atau rapat harian untuk memperoleh keputusan kolektif.”



3. Informan III (Pak Dirman, nama samaran)

Dalam berpartisipasi di Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia, Pak Dirman menduduki posisi sebagai Dewan Penasehat. Kegiatannya di sini mencakup memberikan saran-saran atau masukan dan nasehat pada kader-kader dan pengurus dalam partai.

"Sekarang saya jadi dewan penasehat yang tugasnya memberikan masukan atau saran-saran serta nasehat-nasehat kepada para kader dan pengurus dalam partai."

Selama 8 (delapan) tahun Pak Dirman berpartisipasi dalam PKP Indonesia, dirasakan adanya perbedaan yang besar dalam hal atmosfir kerja jika dibandingkan pada saat masih aktif di kedinasan.

"Perbedaan yang saya rasakan sangat besar dan itu sangat kontradiktif, sangat bertolak belakang. Misalnya, ada beberapa orang yang kurang atau bahkan sama sekali tidak disiplin. Baik itu disiplin waktu dan kerja. Diundang rapat jam 6 sore, baru datang jam 8 malam, akhirnya hasil rapat tidak dapat maksimal, jadi harus menjadwalkan ulang rapat."

Walaupun dirasakan adanya perbedaan, tetapi interaksi antara pak Dirman dan orang-orang di partai dapat berlangsung dengan baik sehingga menghasilkan suatu kerjasama.

"...Ada beberapa orang yang bisa saya ajak kerjasama. Itu biasanya bekerjasama dalam hal menyusun program. Saya kan sebagai dewan penasehat, jadi tugas saya memberi masukan dan mereka menerima masukan dari saya."

Meski kadang kala terjadi juga persaingan di antara Pak Dirman dan orang-orang lain di partai dan bahkan sampai dapat menimbulkan konflik kepentingan.



"Persaingan jelas terjadi, saya merasakannya juga. Ada saja usaha-usaha yang dilakukan untuk menjegal saya. Mereka menginginkan posisi saya agar dapat memberi masukan pada pimpinan di mana masukan tersebut bisa saja hanya untuk menguntungkan pribadi atau golongannya saja. Seringkali konflik kepentingan itu muncul pada saat adu argumen dalam rapat. Ada yang tidak trima omongan saya, lalu ini berlanjut sampai di luar forum. Ada semacam rasa tidak suka pada saya, yang lalu menjadikannya tidak menghormati saya."

Diakui Pak Dirman, sikap-sikap seperti di atas tadi terkadang menimbulkan ketidaknyamanan. Sikap-sikap seperti membuat isu-isu yang tidak benar tentang Pak Dirman, melakukan rekayasa-rekayasa dan masih banyak lagi.

"..Ada banyak hal yang membuat saya tidak nyaman, misalnya suka mencari-cari kesalahan, menyebarkan isu-isu tidak benar tentang saya, melakukan rekayasa, yang tidak diada-adakan, bersikap munafik, semua itu mereka lakukan untuk menjatuhkan mental saya."

Dalam beradaptasi, Pak Dirman merasakan hambatan yang ditemui selama menyesuaikan diri adalah sudah ada sikap antipati terhadap militer. Dalam hal ini purnawirawan TNI mempunyai latar belakang militer.

"Secara pribadi, hambatan dalam menyesuaikan diri yang saya rasakan adalah sikap antipati beberapa orang terhadap militer. Mereka itu orang-orang yang trauma dengan TNI karena TNI dianggap otoriter, suka main perintah dan lain-lain."

Pak Dirman punya cara sendiri untuk mengatasi hambatan yang ditemui, yaitu dengan menawarkan pada orang tersebut, jabatan Pak Dirman dalam partai jika orang itu memang tidak suka padanya.

"Saya katakan silahkan saja kalau you mau gantikan saya, tapi hasilnya pasti tidak akan sebaik saya. Saya mengalah bukan berarti kalah, justru saya lebih dapat berjuang sebagai Dewan Penasehat. Diikuti saja apa maunya, nanti kalau salah ya tinggal diingatkan."



Biar bagaimanapun, Pak Dirman merasa mendapat banyak manfaat dengan berpartisipasi dalam PKP Indonesia.

“Manfaat yang saya peroleh antara lain, tambah pengalaman dalam bermasyarakat, menemui berbagai macam karakter orang dari latar belakang non militer. Tapi kalau dari segi finansial jelas tidak ada. Bahkan kadang-kadang malah rugi. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa perjuangan memerlukan pengorbanan.”

Kemudian Pak Dirman mengatakan tujuan berpartai adalah mengembalikan atau setidaknya menyadarkan orang-orang dalam partai yang hanya menggunakan partai untuk meraih kepentingannya sendiri.

“Tujuan saya, seperti sudah saya bilang tadi, ingin mengembalikan atau setidaknya menyadarkan orang-orang dalam partai yang hanya ingin cari duit dan kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi tidak peduli apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 45.”

Pak Dirman masih tetap melakukan beragam upaya untuk meraih tujuannya dalam berpartai. Apabila upaya tersebut telah dilakukan tapi belum juga dapat mencapai tujuan, maka Pak Dirman akan menulis artikel yang ada hubungannya dengan tujuannya tadi.

“Saya sekarang sedang membuat draft artikel yang berhubungan dengan perjuangan saya. Saya menulis juga ke teman-teman yang kiranya punya satu aspirasi dan idealisme yang sama dengan saya untuk bersatu. Kalau bisa membuat satu partai yang khusus bagi purnawirawan TNI yang ingin berpolitik di partai. Sekarang ini masih saya upayakan.”

Adapun adaptasi purnawirawan TNI dalam partai politik, telah teringkas dalam tabel dibawah ini :

TABEL III. 3**ADAPTASI PURNAWIRAWAN TNI DALAM PARTAI POLITIK**

No.	Nama Informan (Samaran)	Perbedaan Suasana Kerja di Lingkungan TNI dan di Partai Politik	Tindakan Tidak Menyenangkan dari Orang Lain di Dalam Partai Politik	Hambatan yang Ditemui	Cara Mengatasi Hambatan	Tujuan Berpartisipasi dalam Partai	Cara yang Ditempuh Untuk Mencapai Tujuan
1.	Maksum	Di lingkungan TNI, sangat menekankan disiplin dan perintah atasan harus dilakukan. Di lingkungan Partai Politik, lebih bebas mengutarakan pendapat dan mengekspresikan diri.	Sikap tidak menghormati dan memperlakukan latar belakang seseorang.	Tidak menemukan hambatan yang signifikan	Berdialog dan memberi penjelasan	Memenuhi kebutuhan batin yaitu memperoleh rasa bangga.	Memberikan ide untuk program kerja Partai. Bila diterima maka tujuannya tercapai.
2.	Bintang	Di lingkungan TNI, harus selalu tercipta suasana harmonis, tidak boleh ada	Sikap tidak menghormati seperti menuding-nudingkan jari dan meneriakkan kata-	Kurang disiplin waktu dan ada beberapa	Berdialog dan menghubungi Badan Penasehat Partai untuk	Sekedar bersilatuhrahmi dan mengantarkan kader sukses	Membekali kader dengan pengetahuan, kepemimpinan dan menyusun

		<p>arogansi, disiplin di segala hal dan menghormati senior.</p> <p>Di lingkungan Partai Politik, bebas mengeluarkan pendapat, tidak mempedulikan hierarki dan kurang disiplin.</p>	<p>kata kasar.</p>	<p>orang yang suka mencari-cari kesalahan</p>	<p>menjadi penengah.</p>	<p>mencapai tujuan partai.</p>	<p>program kerja dengan sesama pengurus partai.</p>
3.	Dirman	<p>Di lingkungan TNI, menekankan disiplin waktu dan bekerja.</p> <p>Di lingkungan Partai Politik, kurang bahkan sama sekali tidak disiplin waktu.</p>	<p>Sikap suka mencari-cari kesalahan, menyebarkan fitnah, bersikap munafik dan melakukan rekayasa untuk menjatuhkan mental.</p>	<p>Sikap antipati beberapa orang terhadap militer</p>	<p>Mengambil sikap mengalah</p>	<p>Menyadarkan pihak-pihak di dalam lingkungan partai yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi, untuk kembali mengutamakan kepentingan bersama dalam mencapai tujuan partai.</p>	<p>Menulis artikel yang berhubungan dengan perjuangannya.</p>



BAB IV

ANALISIS DATA

Berdasarkan hasil-hasil dari temuan data yang telah dijelaskan, maka diperoleh gambaran mengenai latar belakang partisipasi purnawirawan TNI dalam partai politik serta mengetahui bagaimana purnawirawan TNI tersebut beradaptasi dalam partai politik di mana orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya tidak hanya berlatar belakang militer tapi juga berlatar belakang sipil. Temuan data tersebut berupa hasil wawancara maupun dari berbagai sumber lain yang bisa memberi nilai akan diberikan penafsiran sesuai dengan teori yang telah dijelaskan pada bab pendahuluan. Analisis ini nantinya akan dikelompokkan berdasarkan data yang diperoleh, *Pertama*, yang akan dianalisis adalah latar belakang partisipasi purnawirawan TNI dalam partai politik. *Kedua*, Adaptasi purnawirawan TNI dalam partai politik.

IV. 1. LATAR BELAKANG PARTISIPASI PURNAWIRAWAN TNI DALAM PARTAI POLITIK

Era reformasi membuka koridor partisipasi politik bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dimanfaatkan pula oleh para purnawirawan TNI untuk ikut berpartisipasi di dalam partai politik, yang seperti telah diketahui dulu ketika masih aktif di kedinasan, tidak diperbolehkan untuk berpolitik praktis. Seperti yang telah dipaparkan dalam bab temuan data, bahwa alasan para informan berpartisipasi dalam partai politik terbagi menjadi dua, yakni *Pertama*, merasa



terpanggil untuk mengabdikan pada suatu partai politik dan yang *Kedua*, ingin memperjuangkan aspirasinya sesuai dengan semangat nasionalisme dan idealismenya.

Dalam kelompok alasan yang pertama dijumpai dua orang informan yang berpartisipasi di partai politik disebabkan karena merasa terpanggil untuk mengabdikan pada suatu partai politik di mana keduanya berpartisipasi dalam Partai Golkar, seperti dijelaskan di bawah ini :

"Sebenarnya saya sebelum pensiun itu sudah terpanggil untuk berorganisasi. Secara naluri ya. Saya melihat Golkar itu, program dan tujuannya pada waktu itu seiring dan sejalan atau hampir sama dengan program dan tujuan ABRI. Dengan adanya kesamaan itulah maknanya saya tertarik untuk berorganisasi pada Partai Golkar."
(Informan I, Pak Maksu)

"Alasan saya berpartisipasi di partai itu ya karena atasan minta bantuan saya untuk membantu di kepengurusan dan saya merasa ini juga panggilan tugas karena meskipun saya sudah pensiun, saya tetap menghargai beliau sebagai atasan saya. Bisa dibilang ini bentuk pengabdian saya-lah terhadap Partai Golkar yang dulu memang dibina oleh TNI. Selain itu ya sekalian masih tetap bisa bersilahturahmi dengan kader-kader baru dan menyatu dengan masyarakat."
(Informan II, Pak Bintang)

Dalam kelompok alasan kedua, disebutkan bahwa seorang informan memutuskan untuk berpartisipasi dalam partai politik disebabkan karena ingin memperjuangkan nilai idealismenya.

"Sebetulnya saya memutuskan untuk berpolitik itu karena ingin berjuang. Maksud saya dengan berjuang itu saya ingin setidaknya mulai meluruskan dan memperbaiki nilai-nilai dan tujuan utama dari Pancasila dan UUD 45 yang sekarang ini sudah banyak melenceng dari aslinya dalam konteks kebangsaan dan bernegara. Buktinya adalah Pancasila sudah ingin dihapuskan, tidak digunakan lagi sebagai ideologi bangsa, kemudian UUD 45 pun diamandemen. Padahal jika kita lihat, tak ada yang salah pada Pancasila dan UUD 45, yang salah hanyalah pada person yang telah memelencengkannya. Pada masa yang waktu itu ramai-ramai terjadi



demonstrasi sehingga Pancasila dan UUD 45 juga harus ikut dihilangkan karena dianggap produk pada jaman itu. Nah, dari situ saya berpartai karena tergerak setelah melihat kehidupan berpolitik di Indonesia itu sudah tidak sesuai lagi dengan Pancasila dan UUD 45, sudah melupakan kasih-mengasahi terhadap sesama, tidak ada lagi rasa persatuan dan kesatuan. Masing-masing sibuk memikirkan bagaimana mereka bisa mencapai kepentingan kelompok atau pribadi saja, jadi ajang cari duit.”
(Informan III, Pak Dirman)

Adapun bila dilihat dari alasan memutuskan untuk berpartai setelah masa pensiun tiba dapat dibagi menjadi dua, yaitu *Pertama*, karena sudah punya pengalaman berorganisasi sebelumnya dan *Kedua*, karena ingin mengabdikan. Bila melihat dari data yang diperoleh terlihat bahwa sebagian besar informan menyebutkan bahwa alasan memutuskan untuk berpartai setelah pensiun adalah karena sudah mempunyai pengalaman berorganisasi sebelumnya. Seperti diwakilkan oleh pernyataan Pak Maksud dan Pak Dirman di bawah ini :

“Saya waktu bertugas di Kalimantan Timur sudah menjadi ketua ikatan atletik Balikpapan dan sekitarnya. Tahun 66 saya kebetulan oleh masyarakat sana ditunjuk untuk menjadi ketua penyelenggara seleksi atletik daerah tingkat I provinsi Kalimantan Timur. Itu barangkali merupakan modal dasar saya terpanggil pada organisasi-organisasi sosial..” (Informan I, Pak Maksud)

“Saya bersama teman-teman sempat ikut andil dalam mendirikan sebuah partai yaitu Partai Demokrasi Kasih Bangsa, disingkat PDKB yang lalu saya dipercayakan untuk menduduki posisi sebagai ketuanya. Yang melatar belakanginya ya seperti yang sudah saya bilang tadi, dalam berpolitik sudah tidak ada lagi saling menghargai, saling mengasahi, hanya cari duit saja. Setelah berjalan beberapa waktu, ternyata hal yang sama terjadi juga pada partai PDKB ini. Orang-orang di dalamnya jadi pada berebut posisi, sikut-sikutan dan semakin lama konflik yang terjadi makin runcing, sampai pada akhirnya PDKB dibubarkan.”
(Informan III, Pak Dirman)

Alasan memutuskan berpartai setelah masa pensiun tiba yang disebabkan karena ingin mengabdikan, disebutkan oleh Pak Bintang seperti di bawah ini :



“Ketika saya akan pensiun, memang diberi kebebasan untuk memilih ingin melakukan apa setelah pensiun. Tapi untuk saya pribadi, secara naluri, saya ingin bergabung dalam partai Golkar, karena ingin mengabdikan pada partai yang selama ini sudah melekat dan seiring sejalan dengan TNI dalam berjuang. Nah.. kebetulan, saat itu atasan saya memberi petunjuk agar saya membantu di sini (Golkar, red) saja dan saya diberi tempat dalam kepengurusan partai sebagai sekretaris.”
(Informan II, Pak Bintang)

Respon keluarga ketika para informan memutuskan untuk berpartisipasi dalam partai politik sebagian besar pada awalnya kurang mendukung. Respon keluarga yang kurang mendukung itu adalah istri dari Pak Maksun dan Pak Bintang yang sering mengeluh pada awalnya karena suaminya sering pulang larut malam di mana sibuk mengurus partai. Tapi kemudian setelah diberi pengertian, akhirnya mau mengerti. Seperti yang dinyatakan oleh Pak Maksun dan Pak Bintang berikut ini :

“Respon awal memang ada ketidaksenangan dari istri saya, karena waktu yang dibuang untuk pengabdian di organisasi politik ini kan tanpa ada suatu imbalan (materi, red). Memang ada reaksi tidak suka dari istri yang dilakukannya waktu itu ya terus-menerus menelpon, menyuruh saya lekas pulang sambil marah-marah. Dia bilang ngapain saya kok disini (kantor DPD Tk.II Partai Golkar, red) terus, nggak dapat apa-apa saja kok tetap disini. Yang dia maksud nggak dapat apa-apa itu nggak ada duit atau imbalannya, hahaha.. (tertawa, red). Akhirnya istri saya dapat menerima penjelasan saya dan membiarkan saya tetap disini. Buktinya sampai sekarang ini tidak ada bel-bel (telepon, red) dari rumah menyuruh saya pulang, hahaha.. (tertawa, red). Andaikan tidak menerima, pasti selama wawancara ini, dia pasti sudah 2 atau 3 kali menelpon menyuruh saya pulang, hahaha.. (tertawa, red)”
(Informan I, Pak Maksun)

“Istri saya dulu suka komplain kalau saya pulang larut malam mengurus rapat. Dia nelson terus, tanya kok nggak pulang-pulang, anak-anak juga ikut komplain karena melihat ibunya jadi khawatir terus sama saya. Yah.. biasalah khawatir kalau saya kecapekan trus nanti sakit. Tapi setelah saya jelaskan, saya kasih pengertian, mereka bisa maklum kok.”
(Informan II, Pak Bintang)



Apabila melihat pengalaman masa lalu pada pemerintahan orde baru tentang keluarga ABRI diharuskan memilih salah satu partai saja. Semua informan tidak menganggap hal tersebut adalah suatu paksaan dan bukan merupakan salah satu alasan berpartisipasi dalam partai politik.

"Sebenarnya bukan kewajiban tapi hanya sebatas himbauan saja. Tapi selalu saya tekankan pada anak dan istri saya bahwa asas pemilu itu kan jujur, adil dan rahasia sifatnya. Jadi kalau sudah ada di dalam TPS, menusuk kertas pilih dengan gambar apapun, tidak ada yang tahu apa yang dipilih. Tidak ada paksaan, Cuma kebetulan anak dan istri saya memang ingin memilih Golkar."

(Informan I, Pak Maksum)

"..Yah saya jelaskan pada mereka bahwa ABRI merupakan pembina yang membidangi embrio Golkar. Jadi sebenarnya, nilai-nilai yang saya ajarkan pada anak-anak itu ya nilai-nilai yang saya dapat sebagai anggota ABRI, bukan otoriter lho ya.. Tapi sesuai dengan Pancasila dan UUD 45 yang juga merupakan landasan Partai Golkar. Istri saya juga kan aktif di Persiti (Chandra Kirana, red) jadi ya sudah sejalan."

(Informan II, Pak Bintang)

"..Kalau tentang itu saya rasa biasa-biasa saja, bukan karena dulu nggak bisa ke partai selain Golkar, lantas saya sekarang berpartai di selain Golkar. Justru dulu itu saya mendukung perjuangan Golkar. Sebelum reformasi dan sebelum Golkar berubah paradigmanya. Karena Golkar sekarang berbeda dari yang dululah makanya saya tidak tertarik lagi dengan Golkar. Saya merasa perjuangan pada masa orbalah yang sesuai dengan didikan dan gemblengan yang saya dapat dari ABRI. Keluarga saya pun begitu, dulu tidak merasa terpaksa memilih Golkar karena menyadari, selain itu adalah konsekuensi, mereka mendukung perjuangan Golkar pada saat itu."

(Informan III, Pak Dirman)

Adapun bila melihat pertimbangan khusus yang diambil purnawirawan TNI dalam memilih suatu partai, terbagi menjadi dua, yaitu *Pertama*, ada kesamaan program dan tujuan yang ingin dicapai partai dengan institusinya saat masih aktif. *Kedua*, karena tokoh pendirinya mempunyai latar belakang militer juga. Bila dilihat dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar informan



menyebutkan bahwa pertimbangan khusus yang diambil dalam memilih suatu partai politik adalah karena kesamaan program dan tujuan yang ingin dicapai partai dengan institusinya saat masih aktif. Seperti yang dinyatakan oleh Pak Maksun dan Pak Bintang di bawah ini :

“Saya melihat Golkar itu, program dan tujuannya pada waktu itu seiring dan sejalan atau hampir sama dengan program dan tujuan ABRI. Dengan adanya kesamaan itulah makanya saya tertarik untuk berorganisasi pada Partai Golkar. Saat itu, Golkar belum mendeklarasikan diri sebagai suatu partai politik, hanya sebagai suatu golongan saja, tapi setelah adanya deklarasi paradigma baru Golkar pada tahun 98, kemudian berubah menjadi suatu partai politik. Perjuangan ABRI sama dengan perjuangan Golkar. Nah, kalau sama mengapa saya tidak meneruskan perjuangan itu. Artinya, pengabdian saya sebagai anggota militer setelah tidak aktif di kedinasan tidak harus putus sampai disitu. Mengapa tidak saya teruskan saja perjuangan kalau itu memang sama, ya kan? Yah, itu tadi sedikit cerita kenapa saya tertarik untuk bergabung di partai ini.”
(Informan I, Pak Maksun)

“Saya ingin bergabung dalam Partai Golkar, karena ingin mengabdikan pada partai yang selama ini sudah melekat dan seiring sejalan dengan TNI dalam berjuang. TNI dulu merupakan pembina yang membidangi embrio Golkar.” (Informan II, Pak Bintang)

Bila dilihat dari makna partai politik bagi Purnawirawan TNI, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *Pertama*, sebagai tempat menyalurkan aspirasi politik dan tempat mengabdikan. Sebagaimana diungkapkan oleh Pak Maksun dan Pak Bintang di bawah ini :

“Saya memandang partai ini sebagai penyalur aspirasi itu yang pasti. Aspirasi perjuangan yang tercermin dalam visi dan misi yang jelas dan mantap serta memiliki etika dan moral. Tak seperti partai-partai lain yang saya nilai kurang memiliki itu. Dulu pada saat Golkar dihujat habis-habisan oleh masyarakat atau kelompok kepentingan tertentu, bahkan ada yang sampai membakar sebagian gedung kantor, kita tidak membalas dendam dengan tindakan anarkhis. Ini membuktikan Golkar memiliki etika dan moral dalam perjuangan aspirasinya. Selain itu, saya ini orang yang dari dulu suka berorganisasi jadi disini mempunyai makna mendalam bagi saya karena dari kesukaan tersebut, saya sekaligus dapat mengabdikan



dan berjuang menyalurkan aspirasi saya. Golkar bagi saya merupakan satu-satunya pelopor untuk tetap berjuang mempertahankan Pancasila dan UUD 45 sebagai dasarnya.”

(Informan I, Pak Maksun)

“Saya memandang partai golkar itu seperti anak yang perlu dibesarkan, dibina, dibimbing, agar dapat mencapai tujuan bersama orang-orang banyak. Juga sebagai sarana menyalurkan aspirasi. Aspirasi sesuai dengan keinginan saya. Maknanya bagi saya sebagai penyalur aspirasi dan sebagai tempat aktualisasi diri. Karena kan kalau saya terus aktif di luar rumah, saya bisa bertemu banyak orang, bersilaturahmi yang katanya bisa memperpanjang usia, hahaha.. (tertawa, red) Sekarang citranya sudah semakin baik, saya rasa, dengan adanya reformasi, golkar juga mengadakan perubahan-perubahan, jadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Visi dan misinya lebih untuk kesejahteraan masyarakat serta kesatuan dan persatuan bangsa, sesuai dengan apa yang diperjuangkan oleh TNI.”

(Informan II, Pak Bintang)

Sedangkan yang *kedua* adalah sebagai tempat untuk melanjutkan perjuangan TNI, sebagaimana disebutkan oleh Pak Dirman yaitu :

“Saya menilai partai ini sangat baik. Citra partai ini tidak dapat dilepaskan dari citra pendirinya yaitu Pak Edi Sudrajat. Saya memberi makna yang dalam bagi partai ini, yaitu sebagai tempat saya melanjutkan perjuangan TNI mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 45.”

(Informan III, Pak Dirman)

Partisipasi dalam kehidupan politik dilihat dari alasan bergabung dalam partai politik, berdasarkan data di atas dapat terbagi menjadi dua, yakni *Pertama*, merasa terpanggil untuk mengabdikan pada suatu partai dan yang *Kedua*, ingin memperjuangkan aspirasinya sesuai dengan semangat nasionalisme dan idealismenya.

Dalam hal ini **Milbrath** menyebutkan empat faktor utama yang mendorong seseorang untuk mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. *Pertama*, karena adanya perangsang, maka orang itu mau berpartisipasi dalam kehidupan



politik. Minat untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh misalnya sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau diskusi non-formal. Faktor pertama ini sesuai dengan latar belakang salah satu informan yaitu Pak Dirman, yang sebelum memutuskan untuk berpartisipasi dalam partai politik, senang mengikuti diskusi-diskusi non formal dengan kawan-kawannya sesama pensiunan TNI.

“Awalnya dulu hanya sebatas omong-omong, ngobrol, kalau istilah intelektualnya adalah diskusi-lah dengan kawan-kawan pensiunan TNI tentang rame-rame mau masuk partai apa.”

Faktor yang *kedua* adalah karena faktor karakteristik pribadi seseorang. Orang-orang yang berwatak sosial, yang punya kepedulian besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi dan lain-lainnya, biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik. Faktor yang kedua ini juga sesuai dengan latar belakang Pak Dirman, yang bersama kawan-kawannya pernah mendirikan sebuah partai karena merasa prihatin terhadap kehidupan berpolitik di Indonesia.

“Saya bersama teman-teman sempat ikut andil dalam mendirikan sebuah partai yaitu Partai Demokrasi Kasih Bangsa, disingkat PDKB.. Yang melatar belakanginya ya seperti yang sudah saya bilang tadi, dalam berpolitik sudah tidak ada lagi saling menghargai, saling mengasihi, hanya cari duit saja.”

Faktor yang *ketiga* adalah karena faktor karakter sosial seseorang. Karakter sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang. Bagaimanapun lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Dan faktor yang *keempat*, karena faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan politik yang



kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Latar belakang partisipasi dalam parpol dilihat dari makna atau arti penting sebuah partai bagi purnawirawan TNI, dapat dirumuskan menjadi dua arti penting, yaitu *Pertama*, partai sebagai tempat menyalurkan aspirasi dan tempat mengabdikan diri purnawirawan TNI. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Maksun dan Pak Bintang mengenai arti penting Partai Golkar.

“Saya memandang partai ini sebagai penyalur aspirasi itu yang pasti.. Jadi disini mempunyai makna mendalam bagi saya karena dari kesukaan tersebut, saya sekaligus dapat mengabdikan dan berjuang menyalurkan aspirasi saya.” (Informan I, Pak Maksun)

“Saya memandang partai golkar itu seperti anak yang perlu dibesarkan.. Juga sebagai sarana menyalurkan aspirasi.. untuk saya pribadi, secara naluri, saya ingin bergabung dalam partai golkar, karena ingin mengabdikan pada partai yang selama ini sudah melekat dan seiring sejalan dengan TNI.” (Informan II, Pak Bintang)

Arti penting yang *kedua*, bahwa partai sebagai tempat bagi purnawirawan TNI dalam melanjutkan perjuangan TNI. Sebagaimana dikatakan oleh Pak Dirman.

“.. Saya memberi makna yang dalam bagi partai ini, yaitu sebagai tempat saya melanjutkan perjuangan TNI..”
(Informan III, Pak Dirman)

Purnawirawan TNI yang berpartisipasi dalam partai politik akan mengambil tindakan berdasarkan makna atau arti penting partai baginya. Dengan kata lain, karena suatu partai politik memiliki arti penting bagi purnawirawan TNI, maka purnawirawan TNI berpartisipasi di dalam partai politik tersebut. Pemikiran yang dapat digunakan untuk memahami makna atau arti penting suatu



partai bagi purnawirawan TNI, adalah yang dikemukakan oleh **Herbert Blumer**, yang menurutnya interaksionisme simbolik bertumpu pada tiga premis, antara lain *Pertama*, manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. *Kedua*, makna tersebut berasal dari interaksi seseorang dengan orang lain. *Ketiga*, makna-makna tersebut disempurnakan saat interaksi sosial berlangsung.³⁵

Dalam menilai suatu partai, penafsiran yang dilakukan oleh para purnawirawan TNI yang berpartisipasi dalam partai politik tidak dapat dipisahkan dari interaksi yang terbangun sebelumnya antara purnawirawan TNI dengan lingkungan sosialnya. Penafsiran itulah yang lalu menimbulkan keputusan-keputusan tertentu yang berwujud pada tindakan yang dilakukan, yaitu keputusan untuk berpartisipasi dalam partai politik.

IV. 2. ADAPTASI PURNAWIRAWAN TNI DALAM PARTAI POLITIK

Pada saat seorang purnawirawan TNI memutuskan untuk berpartisipasi dalam partai politik, maka harus dapat segera menyesuaikan diri dengan orang-orang yang juga berpartisipasi di dalamnya. Dengan melihat latar belakang militer purnawirawan TNI yang notabene sangat menjunjung kedisiplinan, efisiensi, etos kerja dan sebagainya, sepertinya purnawirawan TNI akan banyak menemui perbedaan-perbedaan suasana di dalam suatu partai politik di mana orang-orang berasal dari berbagai kalangan.

³⁵ Margareth M. Poloma, *op.cit.*, hal 258.



Bila dilihat dari pendapat purnawirawan TNI tentang perbedaan suasana kerja di lingkungan partai politik jika dibandingkan dengan dulu saat masih aktif dalam keanggotaan TNI, secara keseluruhan informan mengatakan ada perbedaan yang signifikan.

"Saya pikir tidak banyak perbedaan tapi memang ada yang sangat terlihat bedanya, yaitu dulu saat masih dinas, disiplin sangat ditekankan dan perintah atasan bersifat komando, apa kata atasan harus dilakukan. Meski hati grundel tapi mulut berucap siap komandan. Disini tidak, kita bebas mengekspresikan diri. Bila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati, kita bisa mengatakannya. Nah, adaptasi pertama itu kebetulan sudah saya lakukan pada saat masih jadi pengurus di tingkat kelurahan sehingga sekarang disini sudah cepat sekali menyesuaikan diri dengan mereka-mereka ini. Jadi ada semacam komformisme."

(Informan I, Pak Maksu)

"Ya memang berbeda sekali antara lingkungan sipil dan militer itu. Dilihat dari tingkah lakunya, kalau di militer harus selalu tercipta suasana harmonis, tidak boleh ada arogansi, harus disiplin di segala hal dan selalu menghormati senior. Jadi ada kehierarkian yang harus dihormati. Lain halnya disini, lebih bebas mengeluarkan pendapat, tidak mempedulikan hierarki, disiplinnya juga kurang."

(Informan II, Pak Bintang)

"Perbedaan yang saya rasakan sangat besar dan itu sangat kontradiktif. Sangat bertolak belakang. Misalnya, ada beberapa orang yang kurang atau bahkan sama sekali tidak disiplin. Baik itu disiplin waktu dan kerja.."

(Informan III, Pak Dirman)

Adapun bila melihat interaksi sehari-hari yang terjadi di lingkungan partai politik secara keseluruhan informan mengatakan memang ada suatu bentuk kerjasama, persaingan, dan konflik yang terjadi di dalam partai.

"Hubungan saya dengan orang-orang disini baik-baik, saya ini pada dasarnya cepat bergaul, paling cepat menangkap perasaan orang lain karena pengalaman saya dulu selalu mengembangkan tenggang rasa, apa yang dia rasakan kalau bisa juga saya rasakan. Itu mungkin sebabnya mereka menerima saya dan mau bekerjasama dengan saya."

(Informan I, Pak Maksu)



"..Mereka sebenarnya enak diajak bekerjasama, misalnya saling mendukung usulan program yang diajukan karena mereka jadi respek sama saya.."

(Informan II, Pak Bintang)

"..Ada beberapa orang yang bisa saya ajak kerjasama. Itu biasanya bekerjasama dalam hal menyusun program. Saya kan sebagai dewan penasehat, jadi tugas saya memberi masukan dan mereka menerima masukan dari saya."

(Informan III, Pak Dirman)

Wujud persaingan juga dirasakan oleh ketiga informan, di mana disebutkan di bawah ini :

"Di sini pada umumnya orang-orang mempunyai latar belakang pendidikan S1 atau S2 ada yang menduduki posisi di bawah saya. Sedangkan saya yang punya latar belakang militer hanya lulusan Secaba setara SLTA, ini menimbulkan bibit persaingan. Ada yang berpikir kalau Pak Maksu yang lulusan setara SLTA bisa jadi sekretaris, kenapa yang lulusan S1 cuma dapat posisi di bawahnya."

(Informan I, Pak Maksu)

".. Memang tidak secara nyata tapi bisa dirasakan adanya persaingan menduduki suatu posisi tertentu.."

(Informan II, Pak Bintang)

"Persaingan jelas terjadi, saya merasakannya juga. Ada saja usaha-usaha yang dilakukan untuk menjegal saya."

(Informan III, Pak Dirman)

Adapun wujud konflik yang sering terjadi saat jalannya rapat atau pertemuan, antara lain tersebut di bawah ini :

"Setelah itu dalam rapat biasanya orang tadi mengutarakan pendapatnya dan berdebat dengan saya. Terkadang hal ini menyulut suatu konflik. Wujudnya adalah hal-hal menjengkelkan seperti sikap tidak menghormati saya, membeda-bedakan dan mempermasalahkan latar belakang seseorang."

(Informan I, Pak Maksu)

"..maksud saya ingin mengademkan suasana, malah dituding-tuding sambil dia itu mengeluarkan kata-kata kasar.."

(Informan II, Pak Bintang)



“..Seringkali konflik kepentingan itu muncul pada saat adu argumen dalam rapat. Ada yang tidak terima omongan saya, lalu ini berlanjut sampai di luar forum..”

(Informan III, Pak Dirman)

Dari terjadinya persaingan dan konflik itu, seringkali para purnawirawan TNI menerima perlakuan-perlakuan tidak menyenangkan dari orang-orang dalam partai. Misalnya, sikap selalu mencari-cari kesalahan, menyebarkan fitnah, bersikap munafik, mengumpat, menuding-nudingkan jari ke wajah, naik keatas meja dengan emosi dan lain sebagainya.

Hambatan yang ditemui purnawirawan TNI saat menyesuaikan diri di dalam lingkungan partai politik adalah masih rendahnya kualitas SDM yang ada di dalam partai. Ini dapat dilihat dari tidak disiplin waktu dan kerja. Seperti yang Pak Bintang ungkapkan di bawah ini :

“Salah satu hambatan yang saya rasakan dalam menyesuaikan diri adalah masalah disiplin waktu. Saya tidak terbiasa datang terlambat tapi kalau saya komplain ke mereka yang sering telat itu saya lalu dibilang saklek, tidak punya toleransi. Toleransi saya berikan kalau telatnya itu 5-15 menit lah, bukannya 1-2 jam. Sering saya harus membuat ulang jadwal rapat atau pertemuan supaya bisa efektif.”

(Informan I, Pak Bintang)

Lain halnya dengan Pak Dirman, yang melihat ada sikap antipati terhadap purnawirawan TNI dengan latar belakang militer. Berikut penuturannya :

“Secara pribadi, hambatan dalam menyesuaikan diri yang saya rasakan adalah sikap antipati beberapa orang terhadap militer. Mereka itu orang-orang yang trauma dengan TNI karena TNI dianggap otoriter, suka main perintah dan lain-lain.”

(Informan III, Pak Dirman)

Meskipun menemui hambatan dalam menyesuaikan diri di lingkungan partai politik, para purnawirawan TNI selalu berusaha mengatasinya dengan pendekatan persuasif, dengan mengajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah.



"Saya ajak omong dia untuk bisa menyelesaikan perselisihan antara saya dengan dia. Saya beritahu kalau pengalaman seseorang juga diperhitungkan tidak cuma latar belakang pendidikannya saja."

(Informan I, Pak Maksu)

"Saya ajak dia bicara dari hati ke hati, kalau tidak mau ya terpaksa saya panggil dewan penasehat untuk ikut membantu menyelesaikan masalah sebelum menjadi besar."

(Informan II, Pak Bintang)

"Saya katakan silahkan saja kalau you mau gantikan saya, tapi hasilnya pasti tidak akan sebaik saya. Saya mengalah bukan berarti kalah, justru saya lebih dapat berjuang sebagai Dewan Penasehat. Diikuti saja apa maunya, nanti kalau salah ya tinggal diingatkan."

(Informan III, Pak Dirman)

Bila membicarakan tentang manfaat atau keuntungan yang diperoleh purnawirawan TNI selama berpartisipasi dalam partai politik, secara keseluruhan mengatakan tidak memperoleh manfaat atau keuntungan materi (finansial). Manfaat yang dirasakan, lebih pada non materi seperti dapat mengaktualisasi diri, menambah pengalaman dan teman, mengenal banyak karakter orang dan kebanggaan (*prestise*).

"Keuntungan material itu tidak ada tapi keuntungan yang bersifat kejiwaan itu ada, yaitu rasa bangga diri. Itu kan memang tidak bisa diukur dengan rupiah. Kadang untuk mendapatkan rasa bangga ini kita justru berkorban finansial."

(Informan I, Pak Maksu)

"Keuntungan yang saya rasakan hanya sebatas kepuasan batin semata, bila calon sukses menjadi anggota legislatif. Kemudian saya dapat bertemu dan berinteraksi dengan orang baru yang lebih variatif latar belakangnya. Bergaul dengan lebih banyak orang. Saya bisa bersilaturahmi dengan mereka bisa membuat usia lebih panjang, hahaha.. (tertawa, red)."

(Informan II, Pak Bintang)

"Manfaat yang saya peroleh antara lain, tambah pengalaman dalam bermasyarakat, menemui berbagai macam karakter orang dari latar belakang non militer. Tapi kalau dari segi finansial jelas tidak ada."



Bahkan kadang-kadang malah rugi. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa perjuangan memerlukan pengorbanan."

(Informan III, Pak Dirman)

Membahas permasalahan partisipasi purnawirawan TNI dalam partai politik tentu tidak terlepas dari aspek subyektif terhadap perilaku individu dalam lingkungan sosial, dalam hal ini purnawirawan TNI dalam partai tertentu. Oleh karena itu, digunakanlah perspektif **Max Weber** tentang kenyataan sosial, di mana Weber melihat kenyataan sosial sebagai sesuatu yang didasarkan pada motivasi individu dan tindakan-tindakan sosial. Dalam penelitian ini, partisipasi purnawirawan TNI dalam partai politik berada dalam klasifikasi tipe tindakan *Rationalitas berorientasi nilai (Wert Rationalitat)* di mana tindakan ini berawal dari keinginan purnawirawan TNI untuk berpartisipasi di dalam partai politik tertentu, namun tetap merupakan pertimbangan dan pilihan yang sadar oleh purnawirawan TNI itu sendiri. Namun pertimbangan itu kurang memperhitungkan kegunaannya (*utility*) yaitu efektifitas dan efisensinya, karena nilai-nilai yang terkandung di dalam partai bersifat absolut. Maksudnya, purnawirawan TNI tersebut sudah menyadari bahwa dengan kegiatannya di partai akan memberikan beban tersendiri bagi diri dan keluarganya seperti uang pensiun sebulan akan lebih cepat habis karena selain digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, juga dipakai untuk kegiatan di partai politik. Purnawirawan TNI telah menyadari bahwa dengan berpartisipasi di partai maka tidak mendapatkan manfaat material atau keuntungan finansial tapi tetap bersikukuh ingin berpartisipasi di partai politik. Selain beban tidak mendapatkan manfaat materi, ada biaya emosional yang harus dibayar oleh keluarga purnawirawan TNI, seperti kekhawatiran-kekhawatiran



yang menyerang jika suami atau ayahnya saat pulang malam untuk mengurus partai. Selain itu juga ada waktu senggang yang hilang dari purnawirawan TNI yang sebenarnya dapat digunakan untuk melakukan hal-hal yang memberikan manfaat material.

Bila melihat dari tujuan yang ingin dicapai oleh purnawirawan TNI dengan berpartisipasi dalam suatu partai, pada umumnya informan hanya menginginkan tujuan non-materi. Sebatas ingin bersilaturahmi, mendapat prestise yang lebih tinggi dan pengabdian serta memperjuangkan idealismenya. Tidak ada tujuan untuk dapat dicalonkan sebagai calon legislatif atau wakil rakyat, mengingat usia yang sudah tergolong lanjut.

"Tujuan saya pribadi adalah untuk memenuhi kebutuhan batin yang berhubungan dengan rasa bangga tadi. Menjadi sekretaris disini saja saya sudah sangat bangga. Tidak ada keinginan saya untuk dicalonkan atau berambisi ke arah sana."

(Informan I, Pak Maksun)

"Saya tidak punya tujuan untuk nanti bisa dicalonkan atau apa, Cuma ingin bersilaturahmi saja. Mengantarkan calon sampai sukses mencapai tujuan partai itu menjadi kebanggaan juga. Tapi kalau untuk jadi calon legislatif tidak ada ambisi ke sana. Saya sudah tua, sudah 60 tahun, jadi sekretaris di sini sudah sangat bersyukur."

(Informan II, Pak Bintang)

"Tujuan saya, seperti sudah saya bilang tadi, ingin mengembalikan atau setidaknya menyadarkan orang-orang dalam partai yang hanya ingin cari duit dan kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi tidak peduli apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 45."

(Informan III, Pak Dirman)

Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuannya adalah yang sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku dalam partai politik.

"..Saya masih harus tetap terus belajar dan mengejar ketertinggalan saya untuk dapat menyumbangkan karya terhadap partai ini. Belajar dengan



banyak membaca dan belajar dari pengalaman selama saya berorganisasi."

(Informan I, Pak Maksun)

"Kalau segala upaya sudah dicoba ya kembali pada kesepakatan tim saja, asalkan masih sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu sesuai mekanisme dalam partai seperti rapat pleno atau rapat harian untuk memperoleh keputusan kolektif."

(Informan II, Pak Bintang)

"Saya sekarang sedang membuat draft artikel yang berhubungan dengan perjuangan saya. Saya menulis juga ke teman-teman yang kiranya punya satu aspirasi dan idealisme yang sama dengan saya untuk bersatu. Kalau bisa membuat satu partai yang khusus bagi purnawirawan TNI yang ingin berpolitik di partai. Sekarang ini masih saya upayakan."

(Informan III, Pak Dirman)

Dalam memasuki suatu lingkungan tempat tinggal, sekolah ataupun tempat pekerjaan, seseorang diharapkan untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru tersebut agar dapat bertahan (*survive*) sekaligus dapat mencapai tujuan atau orientasinya. Membicarakan permasalahan adaptasi purnawirawan dalam partai politik tentu tidak terlepas dari tindakan untuk mencapai tujuan dan aturan yang telah melembaga di lingkungan partai politik yang mengatur segala kegiatan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, pemikiran dari **Robert K. Merton** dapat digunakan.

Pada dasarnya **Robert K. Merton** mengembangkan teori yang berhubungan dengan penyimpangan (*deviasi*) dari sudut struktur sosial dan budaya. Menurutnya, di antara segenap unsur sosial budaya, terdapat dua unsur terpenting, yaitu kerangka aspirasi dan unsur yang mengatur segala kegiatan untuk mencapai aspirasi tersebut. Dengan kata lain, ada nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada suatu kelompok tentang apa yang dianggap baik dan buruk, juga terdapat kaidah-kaidah yang mengatur kegiatan manusia untuk mencapai



tujuannya. Apabila terjadi ketidakserasian dengan saluran-saluran untuk mencapainya, maka terjadilah perilaku menyimpang.

Dalam penelitian ini, proses adaptasi purnawirawan TNI termasuk ke dalam usaha-usaha adaptasi secara *conformity*, di mana individu menerima atau mendapatkan tujuan dengan cara menerima atau patuh terhadap aturan yang telah melembaga. Ini dapat dilihat dari sikap atau tindakan yang diperlihatkan oleh purnawirawan TNI sehari-hari dalam berinteraksi dengan orang lain dalam partai. Selain berusaha mencapai tujuan melalui mekanisme dan prosedur yang ada dalam suatu partai, sebagaimana dilihat dari pernyataan-pernyataan berikut :

“Bila belum dapat tercapai tentunya saya masih harus tetap terus belajar dan mengejar ketertinggalan saya untuk dapat menyumbangkan karya terhadap partai ini. Belajar dengan banyak membaca dan belajar dari pengalaman selama saya berorganisasi.”

(Informan I, Pak Maksu)

“Kalau segala upaya sudah dicoba ya kembali pada kesepakatan tim saja, asalkan masih sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu sesuai mekanisme dalam partai seperti rapat pleno atau rapat harian untuk memperoleh keputusan kolektif.”

(Informan II, Pak Bintang)

“Saya sekarang sedang membuat draft artikel yang berhubungan dengan perjuangan saya. Saya menulis juga ke teman-teman yang kiranya punya satu aspirasi dan idealisme yang sama dengan saya untuk bersatu. Kalau bisa membuat satu partai yang khusus bagi purnawirawan TNI yang ingin berpolitik di partai. Sekarang ini masih saya upayakan.”

(Informan III, Pak Dirman)



BAB V

PENUTUP

V. 1. KESIMPULAN

Dalam skripsi ini, telah dicoba untuk memaparkan secara berurutan, permasalahan mengenai partisipasi purnawirawan TNI dan yang utama dibahas disini adalah latar belakang partisipasi dan adaptasi purnawirawan TNI di dalam lingkungan partai politik. Dari temuan data yang telah dianalisis, maka diperoleh jawaban atas permasalahan penelitian, yaitu :

1. Alasan berpartisipasi purnawirawan TNI dapat dibedakan menjadi dua, *Pertama*, karena merasa terpanggil untuk mengabdikan pada suatu partai politik, di mana partai tersebut merupakan binaan dari TNI saat purnawirawan TNI masih aktif di kedinasan. *Kedua*, karena ingin memperjuangkan aspirasi sesuai dengan semangat nasionalisme dan idealismenya. Adapun pertimbangan khusus bagi purnawirawan TNI dalam memilih suatu partai politik adalah karena terdapat kesamaan program kerja dan tujuan partai dengan program kerja dan tujuan institusinya pada saat masih aktif di kedinasan dan karena dalam partai tersebut, pendirinya adalah sosok yang mempunyai latar belakang militer pula. Sedangkan makna atau arti penting partai politik bagi purnawirawan TNI adalah sebagai penyalur aspirasi politik dan sebagai wadah atau tempat untuk melanjutkan perjuangan TNI setelah tidak aktif dari kedinasan (pensiun).



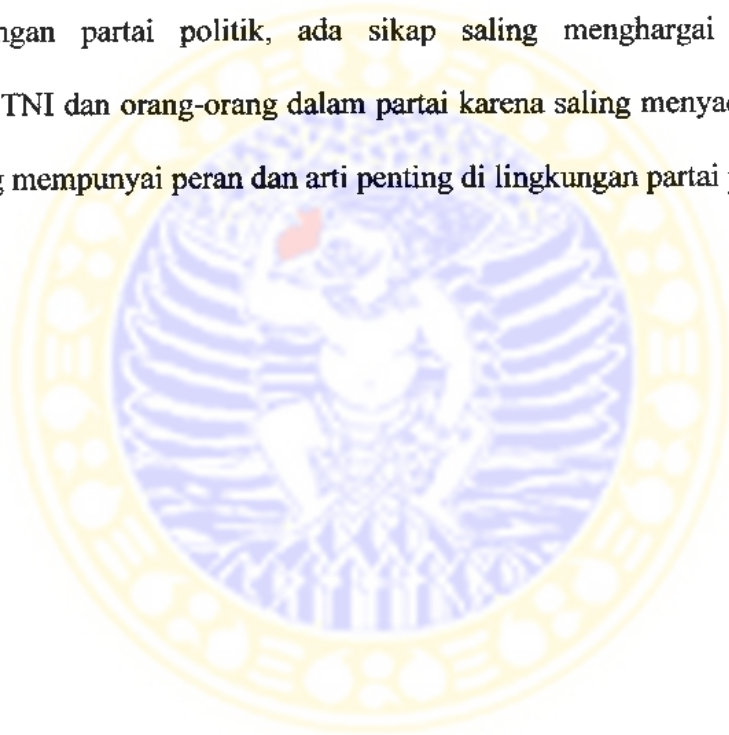
2. Para purnawirawan TNI dalam berpartisipasi, melakukan usaha-usaha atau tindakan-tindakan yang dapat digolongkan sebagai suatu **komformitas** (*comformity*) karena dalam melakukan usaha untuk mencapai tujuan, disertai upaya-upaya yang sesuai atau selaras dengan aturan-aturan atau mekanisme dan prosedur yang ada, sehingga purnawirawan dapat menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan suatu partai politik. Informan pada awalnya memang menemukan hambatan dalam menyesuaikan diri dalam lingkungan partai politik, seperti terdapat sikap antipati beberapa orang terhadap purnawirawan TNI yang berlatar belakang militer dan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam partai yang terkadang berpotensi untuk menimbulkan konflik. Tetapi purnawirawan TNI berusaha untuk dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan kebiasaan dan aturan-aturan yang ada dalam partai sehingga masalah yang ada dapat terselesaikan.

V. 2. REKOMENDASI

Partisipasi purnawirawan TNI dalam partai politik ini memang menarik untuk diketahui latar belakang atau faktor yang mendorong seorang pensiunan TNI dengan latar belakang militer mau berpartisipasi dalam partai politik yang di dalamnya terdapat banyak individu dengan latar belakang berbeda-beda dan mereka bersedia meluangkan tenaga, waktu dan pikirannya untuk partai politik di mana purnawirawan TNI itu tidak mendapatkan keuntungan atau manfaat material hanya sekedar manfaat non-materi yang berhubungan dengan kepuasan batin, yaitu kebanggaan (*prestise*).



Studi mengenai partisipasi purnawirawan TNI dalam partai politik yang dilakukan masih jauh dari sempurna sehingga diharapkan nantinya dapat digali permasalahan lain yang lebih mendalam, seperti misalnya makna atau arti penting purnawirawan TNI dari sudut pandang orang-orang yang ada dalam partai, yang bersedia merekrut purnawirawan TNI sebagai pengurus partai. Kemudian nantinya dapat diketahui makna purnawirawan TNI sehingga dalam berinteraksi dalam lingkungan partai politik, ada sikap saling menghargai di antara purnawirawan TNI dan orang-orang dalam partai karena saling menyadari bahwa masing-masing mempunyai peran dan arti penting di lingkungan partai politik.



DAFTAR PUSTAKA

- Baasir, Faisal. **"Indonesia Pasca Krisis"**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004
- Horton, Paul B. & Chester L. Hunt, **"Sosiologi"** jilid 1, Edisi keenam, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1993.
- Indria Samego, **"TNI di Era Perubahan"**, Penerbit Erlangga, Jakarta. 2001.
- Johnson, Paul Doyle, **"Teori Sosiologi Klasik dan Modern"** Jilid 1, PT Gramedia, Jakarta, 1986.
- Liddle, William R., **"Partisipasi dan Partai Politik Pada Awal Orde Baru"**, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1992.
- Moleong, Dr. Lexy J., M.A. **"Metodologi Penelitian Kualitatif"**, cetakan ke-17, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1989.
- Poloma, Margaret M., **"Sosiologi Kontemporer"**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Raga Maran, Rafael., **"Pengantar Sosiologi Politik"**, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Ramlan Surbakti, **"Memahami Ilmu Politik"**, PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 1992.
- Sali Susiana, **"Pemilu 2004 Analisis Politik, Hukum dan Ekonomi"**, P3I Setjen DPR RI, Jakarta, 2003.
- Suwardi. **"Golongan Karya Salah Satu Kekuatan Politik Indonesia"**, Skripsi, FISIP Universitas Airlangga, Surabaya, 1987.
- Said, Salim, **"Wawancara Tentang Tentara dan Politik"**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, Catatan Pengantar oleh Dr.Anhar Gonggong.
- Soekanto, Soerjono, **"Sosiologi Suatu Pengantar"**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Undang-Undang Politik 2003, Fokusmedia, Bandung, 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.34 tahun 2004, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004.

Data Sekunder

- Data dari kantor DPD Tingkat II Partai Golkar di Surabaya.
- Data dari kantor DPK Partai Persatuan dan Kesatuan (PKP) Indonesia di Surabaya.

Surat kabar

- Harian Kompas, Jumat 23 Januari 2004

Situs Internet

- www.mail-archieve.com



PEDOMAN WAWANCARA

I. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama :
2. Usia :
3. Pendidikan :
4. Kedudukan/Jabatan dalam Partai :
5. Berpartisipasi dalam Partai :
6. Lama Bergabung dalam Partai :
7. Pangkat Sebelum Pensiun :
8. Dari Kesatuan :

II. LATAR BELAKANG BERPARTISIPASI DALAM PARTAI POLITIK

1. Bagaimana perjalanan karir bapak selama dinas di TNI?
2. Alasan bergabung dalam Partai Politik
 - a. Sebelum bergabung dalam partai politik, apa kegiatan bapak setelah pensiun dari TNI?
 - b. Mengapa bapak memilih untuk berkarir di dalam partai politik setelah tidak aktif lagi di kedinasan TNI ?
 - c. Bagaimana awal mula bapak bergabung dalam partai politik ? Tolong diceritakan.
 - d. Bagaimana atau apa yang bapak rasakan pada saat masa orde baru ketika pemerintahan mengharuskan ABRI memilih salah satu partai (Golkar) saja?
2. Makna / nilai suatu Partai Politik bagi Purnawirawan TNI
 - a. Apakah ada pertimbangan khusus ketika bapak memilih untuk bergabung ke dalam partai ini ? Tolong diceritakan.
 - b. Bagaimana bapak memandang partai ini ?
 - Visi dan Misi Partai
 - Citra Partai

- c. Bagaimana respon keluarga atas keputusan bapak bergabung dalam partai ini ?
- Reaksi Awal
 - Penerimaan positif (Mengapa dan apa bentuknya)
 - Penerimaan negatif (Mengapa dan apa bentuknya)

III. ADAPTASI PURNAWIRAWAN TNI DALAM PARTAI POLITIK

1. Kegiatan bapak di partai ini meliputi apa saja ?
2. Adakah perbedaan atmosfer kerja dalam lingkungan partai, jika dibandingkan dengan dulu saat bapak masih aktif dalam keanggotaan TNI ?
3. Bagaimana hubungan interaksi sehari-hari bapak dengan orang-orang di partai ini ?
 - Kerjasama (sebutkan bentuknya dan ceritakan)
 - Persaingan (sebutkan bentuknya dan ceritakan)
 - Konflik (sebutkan dan ceritakan)
4. Apakah bapak merasakan ada ketidaknyamanan bekerja di lingkungan partai ini ? Dimana orang-orangnya memiliki latar belakang yang beragam tidak hanya dari militer saja.
5. Apa yang dilakukan orang tersebut sehingga membuat ketidaknyamanan bagi bapak ? Bagaimana bapak mengatasi situasi demikian ?
6. Pada awal bapak bergabung dalam partai ini, hambatan apa yang bapak rasakan atau temui dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan partai ini ? Tolong jelaskan.
7. Sekarang setelah beberapa waktu bapak bergabung, keuntungan apa yang bapak peroleh dari partai ini ?
8. Apakah tujuan bapak (pribadi) dalam berpartisipasi dalam partai ini ? Bagaimana upaya bapak untuk mencapainya ?
9. Jika bapak telah berusaha semaksimal mungkin tapi belum dapat mencapai tujuan, apa yang akan bapak lakukan ?